

Aprilia Intan Nur Aini, Febry Fabian Susanto

**EFEKTIVITAS SALURAN KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO
(Studi Kasus Pada Kantor Akuntansi Publik Gideon Adi & Rekan Surabaya)**

Thomas Richardson Freitas Asa, Sarlin P. Nawa Pau, Siprianus G. Tefa

**PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAKEKUN
KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA**

Lia Nur Fadhilah

**PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER
TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE DI SHOPEE
(IBU PKK DESA DUKUH MADUREJO)**

Ismul Aksan, Muhsin N Bailusy, Filipus Argentano Guntur Suryaputra

***CROSS-RELIGIOUS ADOPTION OF ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY
AND FINANCIAL LITERACY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW***

Apip Alansori, Balqis Anggraini, Nayla Qhoirunazli Sasmita, Suci Ameria

***THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING
STANDARD POLICIES IN THE VALUE OF TRANSPARENCY AND
ACCOUNTABILITY IN PUBLIC SECTOR FINANCIAL MANAGEMENT
(Case Study of Serdang Village, Tanjung Bintang District)***

Emanuello Elman Peter Logo, Rikhard Titing Christopher Bolang, Olivia Louise Eunike Tomasowa

**EVALUASI PELELANGAN DAN PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN
DINAS PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG
(STUDI PADA BKAD KOTA KUPANG)**

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Diterbitkan oleh :

Universitas Nusa Cendana

Volume 14, No. 1, Maret 2026

Hal. 1 - 66

ISSN : 2338-4468

E-ISSN : 2715-1158

Jurnal Akuntansi

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

PELINDUNG / PENASEHAT

Dekan FEB UNDANA

Dr. Apriana H. J. Fanggaldae.,SE.,M.Si

PENANGGUNG JAWAB

Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan FEB UNDANA

Dr. Rolland E. Fanggaldae, SSi-Teol., MM

PENGARAH

Koordinator Program Studi Akuntansi
Yohana Febiani Angi, SE., MAKS

PEMIMPIN REDAKSI

Sarinah Joyce M. Rafael, SE.,M.Acc.,Ak.,CA

EDITOR

Maria Prudensiana L. Muga, SE., M.Si., Akt
Filipus Argentano Guntur Suryaputra
S.E., M.Ak

Sarlin Peleina Nawa Pau, SE., M.Sc., CfrA

Indah Mutiara, S.E., M.E

Eve Ida Malau, S.Pd., M.Si

LAYOUT DAN DESAIN GRAFIS

Dedy Prasetyo Kadji, S.Ak

REVIEWER

Prof. Indra Bastian, Ph.D., MBA, CA,
CMA (Universitas Gadjah Mada);

Prof. Dr. Intiyas Utami, S.E., M.Si., Ak.,
CA., CMA., QIA., CFrA (Universitas
Kristen Satya Wacana);

Prof. Dr. Dian Anita Nuswantara, S.E.,
M.Si., Ak (Universitas Negeri Surabaya);

Dr. Siti Maghfiroh., SE., M.Si., Ak., CA.,
ACPA., CTA., QIA., CRA., CRP.,
CRMP., CHRP., CPOF., CACP

(Universitas Jenderal Soedirman);

Moni Wehelmina Muskanan, S.E., MPA,
Ph.D, CFrA (Universitas Nusa Cendana);

Dr. I Komang Arthana, SE., M.Si., Ak.,
CA (Universitas Nusa Cendana);

Dr. Markus A. K. B. Hallan, SE, M.Si,
M.Acc., Ak., CA (Universitas Nusa
Cendana)

ALAMAT REDAKSI

Jl. Adisucipto Penfui Kupang-NTT

Telp. (0380) 881183

Fax. (0380) 881183

Email: jak.feb@undana.ac.id

Terbit 2x: MARET dan OKTOBER

Jurnal Akuntansi:

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

diterbitkan oleh:

UNIVERSITAS NUSA CENDANA

DAFTAR ISI

1 - 9

- **EFEKTIVITAS SALURAN KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO (Studi Kasus Pada Kantor Akuntansi Publik Gideon Adi & Rekan Surabaya)**
Aprilia Intan Nur Aini
Febry Fabian Susanto

10 - 20

- **PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA**
Thomas Richardson Freitas Asa
Sarlin P. Nawa Pau
Siprianus G. Tefa

21 - 29

- **PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE DI SHOPEE (IBU PKK DESA DUKUH MADUREJO)**
Lia Nur Fadhilah

30 - 40

- ***CROSS-RELIGIOUS ADOPTION OF ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY AND FINANCIAL LITERACY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW***
Ismul Aksan
Muhsin N Bailusy
Filipus Argentano Guntur Suryaputra

41 - 42

- ***THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD POLICIES IN THE VALUE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC SECTOR FINANCIAL MANAGEMENT (Case Study of Serdang Village, Tanjung Bintang District)***
Apip Alansori
Balqis Anggraini
Nayla Qhoirunazli Sasmita
Suci Ameria

52 - 66

■ **EVALUASI PELELANGAN DAN PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN
DINAS PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG (STUDI PADA BKAD KOTA
KUPANG)**

Emanuello Elman Peter Logo

Rikhard Titing Christopher Bolang

Olivia Louise Eunike Tomasowa

**EFEKTIVITAS SALURAN KOMUNIKASI DALAM MENUNJANG
PELAKSANAAN IDENTIFIKASI DAN PENILAIAN RISIKO
(Studi Kasus Pada Kantor Akuntansi Publik Gideon Adi & Rekan Surabaya)**

Aprilia Intan Nur Aini

UIN Sunan Ampel Surabaya

apriaiantanna@gmail.com

Febry Fabian Susanto

UIN Sunan Ampel Surabaya

febryfabiansusanto@uinsa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas saluran komunikasi dalam mendukung pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko pada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi & Rekan Surabaya. Latar belakang penelitian didasari oleh tantangan audit berbasis risiko yang menuntut auditor tidak hanya memiliki pemahaman teknis terhadap entitas klien, tetapi juga koordinasi internal yang efektif dalam tim audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tiga auditor serta telaah dokumen internal. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan komunikasi vertikal dan horizontal berjalan saling melengkapi dalam memperkuat proses audit berbasis risiko.

Kata kunci : Audit Berbasis Risiko, Saluran Komunikasi, Teori Komunikasi

ABSTRACT

This study aims to understand the effectiveness of communication channels in supporting the implementation of risk identification and assessment at the Gideon Adi & Partners Public Accounting Firm in Surabaya. The background of this study is based on the challenges of risk-based auditing, which requires auditors to not only have technical understanding of client entities, but also effective internal coordination within the audit team. This study uses an interpretive qualitative approach with data collection through in-depth interviews with three auditors and a review of internal documents. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the application of vertical and horizontal communication complement each other in strengthening the risk-based audit process.

Keywords : Risk-Based Auditin, Communication Channels, Communication Theory

PENDAHULUAN

Praktik audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material melalui penerapan prosedur yang sistematis dan profesional. Dalam kerangka standar profesional, auditor diharapkan mampu menilai risiko dengan mempertimbangkan kompleksitas bisnis klien, sistem pengendalian internal, serta lingkungan operasional perusahaan (Triyanto, 2024; Ginting, 2024). Namun, yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan kompleksitas entitas bisnis di Indonesia terutama akibat digitalisasi dan perubahan regulasi justru menambah tekanan bagi auditor dalam memastikan ketepatan penilaian risiko. Akibatnya, auditor kerap menghadapi keterbatasan waktu dan sumber daya yang dapat meningkatkan risiko terjadinya salah saji material (Wahyuni et al., 2022).

Pendekatan audit berbasis risiko (*risk-based audit*) merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas audit. Menurut Petukh & Shvyreva, (2021) auditor seharusnya memusatkan perhatian pada area dengan potensi salah saji material tertinggi. *International Standard on Auditing* (ISA) 315 pun menekankan bahwa auditor harus memahami entitas dan lingkungannya untuk menilai risiko secara tepat (Lubenchenko & Korinko, 2021). Namun, dalam praktiknya di banyak KAP di Indonesia, penerapan audit berbasis risiko belum sepenuhnya optimal. Fenomenanya, sebagian auditor masih melaksanakan audit dengan pendekatan prosedural dan *checklist* tanpa pemetaan risiko yang komprehensif. Hal ini menyebabkan strategi audit tidak selalu berbasis risiko aktual, melainkan sekadar mengikuti standar minimum, sehingga efektivitas audit menurun (Smagina & Petrova, 2024).

Keberhasilan audit berbasis risiko sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi efektif di antara anggota tim audit (Bhandari et al., 2025). Proses penilaian risiko yang efektif membutuhkan pertukaran informasi yang lancar agar auditor mampu mengidentifikasi area berisiko dengan tepat. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi

dalam tim audit sering kali tidak berjalan optimal. Auditor junior terkadang kurang memahami instruksi auditor senior, atau umpan balik tidak disampaikan secara langsung. Akibatnya, pemahaman terhadap area risiko menjadi tidak seragam di antara anggota tim, yang dapat berujung pada ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan prosedur audit (Wang & Wang, 2025).

Menurut teori komunikasi organisasi yang dikemukakan oleh Bovée & Thill, (2013), komunikasi yang efektif mencakup enam tahap penting: pengirim memiliki ide, mengkodekan pesan, mengirim melalui media, penerima menafsirkan pesan, dan memberikan umpan balik. Dalam konteks audit, komunikasi ini mencakup instruksi dari auditor senior kepada anggota tim dan diskusi antar auditor untuk menyelesaikan temuan. Idealnya, setiap tahapan berlangsung dengan jelas dan responsif (Mamat et al., 2023). Namun kenyataannya, banyak hambatan muncul seperti pesan yang kurang jelas, perbedaan persepsi antar auditor, serta media komunikasi yang kurang efisien. Hal ini menyebabkan kesalahan interpretasi terhadap temuan audit dan berpotensi menurunkan kualitas penilaian risiko (Bar-Hava, 2024).

Selain itu, Katz & Kahn (1966) membedakan dua jenis komunikasi utama: vertikal (antara atasan dan bawahan) dan horizontal (antar rekan sejawat). Komunikasi vertikal idealnya menjamin pengawasan dan bimbingan, sementara komunikasi horizontal memperkuat kolaborasi dan respons cepat antar auditor. Beberapa penelitian juga menegaskan bahwa komunikasi yang terstruktur dapat mempercepat penyelesaian salah saji material (Maksymov et al., 2023; Grosu et al., 2021; Smagina & Petrova, 2024). Sedangkan di KAP Indonesia menunjukkan bahwa jalur komunikasi vertikal masih sangat dominan dan sering bersifat satu arah. Akibatnya, umpan balik dari staf junior kurang diperhatikan, sedangkan komunikasi horizontal antar auditor sering berlangsung informal tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan atau duplikasi pekerjaan (Yudintseva, 2023; Holovach & Holovach, 2024).

KAP Gideon Adi & Rekan Surabaya telah menerapkan struktur komunikasi yang mengikuti teori yaitu melalui jalur vertikal dari staf audit hingga partner penanggung jawab dan komunikasi horizontal antar auditor satu level (Adi & Adi, 2021). Namun komunikasi ini belum sepenuhnya efektif. Auditor sering menghadapi hambatan dalam berinteraksi dengan klien, terutama terkait perbedaan pemahaman teknis terhadap informasi keuangan dan keterlambatan respon atas permintaan data. Selain itu, dinamika emosional, seperti ketegangan dalam pembahasan temuan sensitif, serta keterbatasan akses teknologi di beberapa klien, turut memperlambat proses komunikasi. Fenomena ini menegaskan bahwa meskipun struktur komunikasi sudah ada, efektivitasnya masih perlu diperkuat agar proses identifikasi dan penilaian risiko berjalan optimal.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi vertikal dan horizontal yang diterapkan di KAP Gideon Adi & Rekan Surabaya, serta menilai sejauh mana efektivitas komunikasi tersebut mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko salah saji material. Penelitian ini juga mengkaji kesesuaian praktik komunikasi dengan standar mutu internal audit dan prinsip ISA 315. Secara teoretis, studi ini diharapkan mengisi celah literatur mengenai hubungan antara komunikasi tim audit dan efektivitas penilaian risiko di Indonesia yang masih terbatas (Suwatno, 2019). Sementara secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi KAP untuk menyusun sistem komunikasi yang lebih adaptif, berbasis teknologi, dan selaras dengan tuntutan audit modern di era digital.

KAJIAN TEORI

Penilaian Risiko Dalam Audit Berbasis Risiko

Audit berbasis risiko (*Risk-Based Audit/RBA*) merupakan pendekatan audit yang menekankan pemeriksaan pada area yang memiliki tingkat risiko tertinggi. Tujuannya untuk membantu auditor merencanakan

program audit yang sesuai dengan profil risiko klien dan industri yang mereka hadapi, sekaligus mempertimbangkan tujuan strategis klien dalam melakukan penilaian risiko, bukan hanya berdasarkan data historis (Mohammadi et al., 2014). Dengan memahami risiko yang paling material terhadap laporan keuangan, auditor dapat menyesuaikan sumber daya secara efektif, mengurangi pekerjaan yang tidak perlu, dan meningkatkan ketepatan temuan audit (Izvarina et al., 2021). Di Indonesia, audit berbasis risiko juga telah diterapkan secara luas di Kantor Akuntan Publik untuk mengidentifikasi risiko salah saji (Mahendra & Soedibyo, 2023).

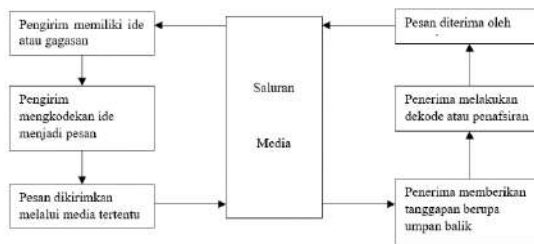
Dalam pelaksanaannya di Kantor Akuntan Publik Indonesia, diatur oleh Standar Audit (SA) dalam SPAP yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang berakar pada Standar Internasional seperti *International Standards on Auditing (ISA)* yang dibuat oleh *International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)* dibawah pengawasan *International Federation of Accountants (IFAC)*.

Proses penilaian risiko diawali dengan pemahaman mendalam tentang struktur organisasi, sistem pengendalian internal, serta karakteristik dan dinamika industri klien. Auditor kemudian menilai risiko salah saji pada tingkat laporan keuangan maupun asersi, dan mendokumentasikannya (Dharmawati et al., 2024). Dengan demikian, proses ini membantu auditor memenuhi harapan stakeholders atas kualitas audit yang tinggi dan kepatuhan terhadap standar professional (Grosu et al., 2021).

Teori Komunikasi

Proses komunikasi sebagai suatu sistem yang bersifat sistematis dengan adanya umpan balik (Bhandari et al., 2025). Dalam bukunya *Business Communication Today*, Bovée dan Thill, (2013) mengemukakan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi antara dua pihak atau lebih, yang melibatkan enam tahapan utama, yang digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Pola komunikasi Bovée dan Thill, (2013)



Seseorang (pengirim) punya sesuatu yang ingin disampaikan, seperti ide, informasi, pesan, atau pendapat. Ide tadi diubah menjadi kata-kata, tulisan, gambar, atau bentuk lain yang bisa dimengerti oleh orang lain. Pesan itu kemudian disampaikan lewat saluran tertentu, misalnya lewat bicara langsung, telepon, email, atau chat. Orang yang dituju (penerima) menerima pesan itu lewat media yang digunakan. Penerima mencoba memahami maksud dari pesan yang diberikan, sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setelah memahami, penerima merespons balik, bisa berupa jawaban, komentar, atau tindakan tertentu sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima dan dipahami.

Saluran Komunikasi

Saluran komunikasi dalam organisasi adalah jalur yang digunakan untuk mengirimkan informasi, pesan, dan instruksi di antara anggota organisasi guna mencapai tujuan bersama (Tsebee, 2024). Fungsinya untuk menciptakan aliran informasi yang jelas, efisien, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat waktu. Komunikasi yang efektif tidak hanya mempercepat koordinasi antarbagian, tetapi juga meningkatkan keterlibatan karyawan dan membangun budaya organisasi yang terbuka (Tijjani, 2023). Dengan demikian, saluran komunikasi menjadi fondasi penting dalam menjaga keselarasan antar individu dan departemen di lingkungan kerja. Penelitian oleh Bright, (2021) menunjukkan bahwa organisasi dengan komunikasi internal yang kuat mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepuasan kerja.

Katz & Kahn, (1966) membagi saluran komunikasi ke dalam dua pola utama, yaitu saluran komunikasi formal meliputi vertikal *top-down* dan *bottom-up*, horizontal. Pola komunikasi vertikal *top-down* terjadi dari atasan ke bawahan dan digunakan untuk menyampaikan instruksi, kebijakan, atau keputusan manajerial yang sifatnya mengikat, serta menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan operasional harian (Oktavianoe, 2023). Sebaliknya, pola komunikasi vertikal *bottom-up* mengalir dari bawahan ke atasan dan berguna untuk menyampaikan laporan, saran, atau peringatan terhadap potensi risiko yang tidak terjangkau oleh manajemen puncak, namun pelaksanaannya sering terhambat oleh pengaturan otoritas yang kaku (Iriyanti et al., 2022). Sementara itu, pola komunikasi horizontal berlangsung antarpegawai dalam tingkat jabatan yang sejajar, bertujuan untuk mendukung kerja sama antardepartemen, mempercepat koordinasi, serta menyatukan pemahaman dalam pelaksanaan tugas bersama (Nurmitasari et al., 2024). Sedangkan pola komunikasi diagonal, yang melibatkan pertukaran informasi lintas unit tanpa memperhatikan jenjang hirarki, terbukti mempercepat respons dalam penanganan masalah dan memperluas jangkauan koordinasi di antara berbagai divisi organisasi (Saputra et al., 2023). Di luar jalur formal, saluran komunikasi informal seperti percakapan spontan atau komunikasi antarpribadi juga memainkan peran vital dalam membangun kepercayaan, memperkuat hubungan sosial, dan menyebarkan informasi secara cepat, meskipun kadang mengandung risiko distorsi informasi jika tidak dikelola dengan baik (Tijjani, 2023).

Dalam mendukung saluran komunikasi yang efektif, organisasi memanfaatkan beragam media komunikasi, baik secara tatap muka maupun digital (El Mezouar et al., 2024). Media formal seperti dokumen resmi digunakan dalam komunikasi kebijakan, sedangkan media informal seperti grup percakapan digunakan untuk diskusi cepat dan membangun hubungan sosial. Penggunaan media yang tepat membantu mempercepat arus informasi, meningkatkan keterlibatan tim, dan memperkuat koneksi lintas unit kerja (Iriyanti et al., 2022). Di Perna et al., (2024)

menjelaskan bahwa harmonisasi media formal dan informal dalam komunikasi organisasi sangat efektif dalam menciptakan kolaborasi yang dinamis dan mempercepat pengambilan keputusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretif (Creswell, 2017), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana saluran komunikasi internal berperan dalam mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko di lingkungan Kantor Akuntan Publik. Proses pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan di Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Surabaya.

Sumber data primer berasal dari wawancara mendalam dengan tiga auditor sebagai informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih individu yang dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti, meliputi bapak Andi, bapak Aji dan bapak Wahyu, yang memiliki peran aktif dalam pelaksanaan audit serta keterlibatan dalam sistem komunikasi tim audit. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen internal Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Surabaya sebagai data sekunder.

Peneliti melakukan wawancara secara tatap muka dengan mengajukan pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya untuk menggali pandangan auditor mengenai efektivitas proses dan saluran komunikasi tim dalam mendukung proses identifikasi dan penilaian risiko. Seluruh wawancara direkam dan ditranskripsikan untuk dianalisis. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (1994) yang meliputi tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan membaca seluruh data secara berulang untuk menemukan makna dan pemahaman yang mendalam, lalu disusun menjadi narasi yang mencerminkan temuan utama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Audit Berbasis Resiko

Penerapan audit berbasis risiko di Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan terlihat dari tahapan-tahapan audit yang disusun dan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Standar Audit (SA) 315 (Revisi 2024) tentang *Identifikasi dan Penilaian Risiko Salah Saji Material* serta Standar Audit (SA) 330 tentang *Tanggapan Auditor terhadap Risiko yang Dinilai*. Proses identifikasi dan penilaian risiko salah saji material di Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap entitas klien dan lingkungannya melalui tahapan-tahapan berikut:

Gambar 2. (SA) 315 (Revisi 2024) di Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan

Aktivitas	
Informasi umum dan aspek legalitas	✓
Struktur Organisasi dan Tanggung Jawab	✓
Proses aktivitas bisnis utama	✓
Pemahaman peraturan yang relevan	✓
Pemahaman lingkungan bisnis	✓
Analisis kelangsungan usaha	✓
Pemahaman penyiapan dan penyusunan LK	✓
Analisis faktor kecurangan	✓

Sejalan dengan ketentuan Standar Audit (SA) 315 (Revisi 2024) yang menuntut auditor untuk mengidentifikasi risiko salah saji material baik pada tingkat laporan keuangan maupun tingkat asersi (Grosu et al., 2021). Dalam proses penilaian risiko, Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan juga menyusun dokumen materialitas awal yang digunakan untuk menetapkan ambang batas salah saji yang dapat diterima. Termasuk menghitung *Overall Materiality (OM)*, *Performance Materiality (PM)*, dan *PAJE/PRJE* berdasarkan formula standar yang mengacu pada pedoman profesional. Setelah risiko dinilai, auditor akan merespon sesuai dengan prinsip Standar Audit (SA) 330, yakni dengan menyesuaikan sifat, waktu, dan luasnya prosedur audit. Dalam prosesnya yang memuat pelaksanaan pengujian substantif terhadap akun-akun seperti penjualan, kas, piutang, dan persediaan. Pengujian dilakukan melalui metode *vouching* dan *tracing*, yang bertujuan untuk memperoleh

Publik agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik Gideon Adi dan Rekan Surabaya yang telah memberikan kesempatan, dukungan, serta akses data selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan berbagi pengalaman meskipun dalam keterbatasan, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa, apresiasi diberikan kepada rekan-rekan akademisi dan keluarga yang senantiasa memberikan motivasi, masukan, dan doa dalam setiap tahap penelitian hingga penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- adi, G., & Adi, K. A. P. G. (2021). Standar Pengendalian Mutu. *Gideon Adi & Rekan : Registered Public Accountants*.
- Bar-Hava, K. (2024). Lessons Learned From Warning Signs Before The October 7, 2023, Failure: Strengthening Board And Auditor Oversight. *Corporate Board: Role, Duties And Composition*, 20(3), 54–61.
<https://doi.org/10.22495/Cbv20i3art5>
- Bhandari, S. B., Jaggi, J., & Yan, H. (2025). Informal Communication: A Path To Success For Internal Auditors. *Current Issues In Auditing*, 19(1), F12–F24.
<https://doi.org/10.2308/Ciia-2023-024>
- Bovée, C. L. ., Thill, J. V. ., Mookerjee, D., & Yagan, S. (2013). *Business Communication Today* (11th Ed.). Pearson Education Limited.
- Bright, O. A. (2021). The Role Of Communication In Enhancing Employees Organizational Commitment. *International Journal Of Advanced Research*, 9(08), 1109–1124.
<https://doi.org/10.21474/Ijar01/13362>
- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Edisi Ketiga). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharmawati, T., Muhandiana, W. O., Rini, A. P., Parintak, U. R., Vitara, S. A., & Farihu, S. (2024). Analysis Of The Role Of Risk Based Audit In Banking. *Journal Of International Multidisciplinary Research*, 2(6), 445–456. <https://doi.org/10.62504/Jimr629>
- Di Perna, L., Bianchi, M., Matteucci, M., & Brambilla, M. (2024). Unveiling Real-World Company Hidden Communication Patterns: Comparing Informal Large-Scale Email Network And Formal Structure. *2024 Ieee International Conference On Big Data (Bigdata)*, 3051–3060.
<https://doi.org/10.1109/Bigdata62323.2024.10825600>
- El Mezouar, M., Da Costa, D. A., & Zou, Y. (2024). An Empirical Study On Collaborative Uses Of Communication Channels For Software Development And Management. *2024 34th International Conference On Collaborative Advances In Software And Computing (Cascon)*, 1–10.
<https://doi.org/10.1109/Cascon62161.2024.10838181>
- Ginting, R. (2024). Pengaruh Pengalaman Auditor, Profesionalisme Auditor, Task Complexity, Time Pressure, Gender Dan Etika Profesi Terhadap Auditor Materiality Judgments (Dki Jakarta, Indonesia). *Jak (Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi)*, 11(2), 361–382.
<https://doi.org/10.30656/Jak.V11i2.9007>
- Grosu, M., Cuza, A., & Mihalciuc, C. (2021a). Audit Risk Assessment And Influence On The Auditor'S Opinion. *Audit Financiar*, 19(163), 528–543.
<https://doi.org/10.20869/Auditf/2021/163/017>
- Grosu, M., Cuza, A., & Mihalciuc, C. (2021b). Audit Risk Assessment And Influence On The Auditor'S Opinion. *Audit Financiar*, 19(163), 528–543.

- <https://doi.org/10.20869/Auditf/2021/163/017>
- Holovach, V., & Holovach, T. (2024). Risk-Oriented Approach In Audit Activity. *Economics. Finances. Law*, 2/2024, 72–78.
<https://doi.org/10.37634/Efp.2024.2.15>
- Iriyanti, H., Majid, A., & Muttaqin, A. (2022). Organizational Communication Pattern Human Resources Division And General In The Maintenance Of Company Assets At Pt. Cement Bosowa Maros. *Respon Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Komunikasi*, 3(1), 129–139.
<https://doi.org/10.33096/Respon.V3i1.103>
- Izvarina, N., Filev, D., & Tepegendjiyan, A. (2021). Risk-Based Audit. *Business Security Management In Modern Conditions*, 38–44.
https://doi.org/10.26526/Chapter_60258635832a26.81416335
- Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). *The Social Psychology Of Organizations*. Wiley.
- Lubchenko, O., & Korinko, M. (2021). Using The International Standard Of Auditing 315 “Identifying And Assessing The Risks Of Material Misstatement Through Understanding The Entity And Its Environment” In The Auditing Practice. *Scientific Bulletin Of The National Academy Of Statistics, Accounting And Audit*, 3–4, 51–63.
<https://doi.org/10.31767/Nasoa.3-4-2021.06>
- Mahendra, D., & Soediby, A. N. (2023). Evaluasi Penerapan Risk-Based Audit Untuk Mendeteksi Ketidakpatuhan Akuntan Publik Terhadap Standar Profesi Dan Regulasi. *Owner*, 7(2), 1707–1719.
<https://doi.org/10.33395/Owner.V7i2.1387>
- Maksymov, E. M., Peecher, M. E., Sutherland, A., & Weber, J. P. (2023). Audit Partners’ Role In Material Misstatement Resolution: Survey And Interview Evidence. *Ssrn Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/Ssrn.4459495>
- Mamat, S. N., Bustamam, K. S., Adanan, S. A., Saidin, A., Sani, A. A., & Samad, K. A. (2023). Exploring Communication Channel Selection For Enhanced Audit Quality: Internship Student’s Perspective. *Information Management And Business Review*, 15(3(I)), 314–324.
[https://doi.org/10.22610/Imbr.V15i3\(I\).3542](https://doi.org/10.22610/Imbr.V15i3(I).3542)
- Miles, Matthew B., And A. Michael Huberman. 1994. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd Ed. Los Angles: Sage Publication Inc
- Mohammadi, J., Kalali, A., & Najafzadeh, A. (2014). Risk-Based Auditing. *Asian Journal Of Research In Business Economics And Management*, 4(11), 366–372.
<https://doi.org/10.5958/2249-7307.2014.01000.7>
- Nurmitasari, A. A., Karnay, S., Farid, M., & Saleh, N. (2024). Communication Patterns Between Leaders And Employees In Improving Performance. *Interference: Journal Of Language, Literature, And Linguistics*, 5(2), 200.
<https://doi.org/10.26858/Interference.V5i2.66562>
- Oktavianoe, A. A. N. (2023). Organizational Communication Patterns In Implementing The Vision And Mission Of The Bontang Sundanese Wargi Society In Bontang City. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2).
<https://doi.org/10.37676/Professional.V10i2.4565>
- Petukh, A. V., & Shvyreva, O. I. (2021). Shaping An Audit Strategy Based On Mapping And Spectral Risk Analysis. *International Accounting*, 24(11), 1276–1309.
<https://doi.org/10.24891/ia.24.11.1276>
- Saputra, A. D., Hamandia, M. R., & Hasmawati, F. (2023). Pengaruh Komunikasi Organisasi Pelatih Psht Dalam Mengatasi Kenakalan Siswa. *At-Tawasul*, 3(1), 40–47.
<https://doi.org/10.51192/Ja.V3i1.553>
- Shvyreva, O., Petukh, A., & Petukh, M. (2021). Application Of Visualization Methods

- Of Audit Risk Assessment In Developing An Audit Strategy. *Ecorfan Journal Mexico*, 1–10. <https://doi.org/10.35429/Ejm.2022.28.13.1.10>
- Smagina, N. V., & Petrova, V. V. (2024). Risk Assessment Steps And Their Changes Due To The Adoption Of International Standard On Auditing (Isa) 315 (Revised 2019). *International Accounting*, 27(5), 564–584. <https://doi.org/10.24891/Ia.27.5.564>
- Suwatno, S. (2019). Audit Komunikasi Sebagai Alat Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Komunikasi Organisasi. *Jurnal Manajerial*, 7(2). <https://doi.org/10.17509/Manajerial.V7i2.16493>
- T., A. T. (2023). Assessment Of Communication As A Crucial Tool In Organizational Management. *Iaa Journal Of Social Sciences*, 9(2), 10–14. <https://doi.org/10.59298/Iaajss/2023/1.2.11000>
- Triyanto. (2024). Impact Of Risk Material Misstatements Assessment On Indonesia Audit Practices. *Revista De Gestão Social E Ambiental*, 18(5). <https://doi.org/10.24857/Rgsa.V18n5-167>
- Tsebee, K. A. (2024). Role Of Communication In Achieving Organisational Efficiency: A Study Of Veritas University, Abuja. *Global Journal Of Human Resource Management*, 12(3), 30–42. <https://doi.org/10.37745/Gjhrm.2013/Vol12n33042>
- Wahyuni, E., Abbas, D. S., Hamdani, H., & Basuki, B. (2022). Pengaruh Kompleksitas Perusahaan, Jenis Industri, Profitabilitas Klien, Ukuran Perusahaan Dan Resiko Perusahaan Terhadap Fee Audit. *Optimal: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(4), 121–145. <https://doi.org/10.55606/Optimal.V2i4.713>
- Wang, J., & Wang, Y. (2025). Is Auditor-Ac Communication A Good Indicator Of Audit Quality? *Managerial Auditing Journal*, 40(3), 245–277. <https://doi.org/10.1108/Maj-06-2024-4358>
- Yudintseva, L. (2023). Identification Of Risks Of Material Misstatement: Information In The Audit File. *Auditor*, 9(7), 18–24. <https://doi.org/10.12737/1998-0701-2023-9-7-18-24>

PENGARUH SOSIALISASI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA LAKEKUN KECAMATAN KOBALIMA KABUPATEN MALAKA

Thomas Richardson Freitas Asa

Universitas Nusa Cendana
tommyfreitas02@gmail.com

Sarlin P. Nawa Pau

Universitas Nusa Cendana
sarlin.pau@staf.undana.ac.id

Siprianus G. Tefa

Universitas Nusa Cendana
siprianus.tefa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mempunyai tujuan untuk mengkaji “pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka”. Studi ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif melalui metode survei. Data primer didapatkan melalui pembagian kuesioner pada para wajib pajak PBB yang terdaftar di Desa Lakekun. Teknik analisis data yang dipergunakan yakni regresi linier berganda melalui bantuan alat analisis SPSS. Temuan dari studi ini memperlihatkan bahwasanya secara individu, sosialisasi pajak tidak memberikan dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak, sementara kesadaran dan sanksi pajak memberi dampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Secara bersamaan, sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak pada pembayaran PBB. Studi ini besar harapannya bisa menjadi pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perpajakan, khususnya dalam usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB.

Kata kunci : sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, PBB

ABSTRACT

This study aims to examine "the influence of tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB) in Lakekun Village, Kobalima District, Malaka Regency". This study applies a quantitative approach with a survey method. Primary data were collected by distributing questionnaires to PBB taxpayers registered in Lakekun Village. The data analysis technique used was multiple linear regression with the help of SPSS analysis tools. The findings of this study indicate that individually, tax socialization does not have a significant effect on taxpayer compliance, while tax awareness and sanctions have a significant effect on taxpayer compliance. Simultaneously, tax socialization, taxpayer awareness, and tax sanctions influence taxpayer compliance in paying PBB. This study is expected to be a consideration for local governments in formulating tax policies, especially in efforts to improve PBB taxpayer compliance.

Keywords : tax socialization, taxpayer awareness, tax sanctions, taxpayer compliance, PBB

PENDAHULUAN

Pajak yakni sumber utama penerimaan negara yang mempunyai andil besar untuk menunjang pembangunan nasional, termasuk pembiayaan infrastruktur, pelayanan publik, serta program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk negara yang tengah berkembang seperti Indonesia, pajak berfungsi sebagai alat penting untuk mengurangi ketergantungan pada sumber dana dari luar dan juga mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Sistem perpajakan yang efektif dapat meningkatkan tata kelola daerah dengan menghadirkan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk pemerintah daerah dalam menjalankan proyek pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemerintah daerah. Sebagai contoh, ketika pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola penerimaan pajak tersebut, pemerintah daerah dapat memprioritaskan investasi yang secara langsung berdampak pada masyarakatnya, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara pembangunan perkotaan dan perdesaan (Putra, 2025).

Seiring dengan pentingnya pajak bagi negara, dalam pemungutannya banyak terdapat masalah. Dilansir dari CNN Indonesia (Nadeak, 2025), Bank Dunia telah mengidentifikasi beberapa isu terkait sistem perpajakan di Indonesia. Terdapat paling tidak tiga isu perpajakan Indonesia yang diidentifikasi oleh Bank Dunia selama tahun 2016 sampai tahun 2021. Satu di antaranya yakni minimnya kepatuhan terhadap pajak.

Pada ruang lingkup otonomi daerah, pajak yang diterima di suatu daerah memiliki peran krusial sebagai satu di antara sumber PAD yang menunjang kemandirian keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Malaka sendiri adalah daerah otonom baru, sehingga peningkatan penerimaan PBB sangat mendesak sebagai sumber pendapatan mandiri untuk pembangunan daerah.

Urgensi permasalahan kepatuhan terhadap PBB dapat dilihat dengan jelas di tingkat lokal, terutama di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka. Data mengenai

ketetapan dan realisasi penerimaan PBB selama tahun 2021 hingga 2025 mencerminkan hasil yang tidak konsisten, di mana beberapa tahun mampu memenuhi target, tetapi pada tahun tertentu, realisasi masih di bawah target. Situasi ini mencerminkan adanya ketidakstabilan kepatuhan pajak yang dapat menghambat peningkatan penerimaan daerah serta pelaksanaan pembangunan di desa.

Lebih lanjut, di lapangan masih terlihat bahwa ada wajib pajak yang belum ataupun terlambat dalam melunasi PBB mereka, sehingga pihak pemerintah desa perlu mengambil langkah-langkah administratif untuk mengatasi kekurangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak belum terbentuk dengan sukarela dan berkelanjutan di kalangan masyarakat. Rendahnya tingkat kepatuhan ini perlu dianalisis untuk menemukan faktor-faktor penyebabnya, agar kebijakan dalam meningkatkan penerimaan PBB dapat dirancang dengan lebih efektif serta relevan dengan konteks.

Kepatuhan wajib pajak mendapatkan pengaruh oleh berbagai faktor, tetapi penelitian ini fokus pada tiga aspek utama, yakni sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai pajak bisa berakibat pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan kewajiban perpajakan, yang pada akhirnya mengurangi pemahaman wajib pajak mengenai krusialnya membayar pajak tepat waktu. Di lain sisi, penerapan sanksi pajak berfungsi sebagai sarana pengawasan demi meningkatkan disiplin wajib pajak melalui efek jera terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak adalah faktor internal yang menentukan terbentuknya kepatuhan sukarela sebagai dasar yang sangat penting keberlanjutan penerimaan pajak daerah.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Hidayat & Islami (2019), Wulandari & Wahyudi (2022) dan Hidayat dkk. (2023) di daerah lain menunjukkan hasil yang beragam. Umumnya, sanksi pajak cenderung memberi dampak positif pada kepatuhan wajib pajak PBB, sedangkan pengaruh dari sosialisasi serta kesadaran sering kali tidak stabil. Situasi ini membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut

di Desa Lakekun, dengan mengkaji mengapa sosialisasi dan kesadaran pajak kurang berhasil meskipun sanksi terbukti memiliki dampak yang positif.

Temuan penelitian sebelumnya menunjukkan sanksi pajak umumnya memiliki efek positif bagi kepatuhan wajib pajak, namun hasil terkait sosialisasi pajak dan kesadaran wajib pajak masih beragam dan inkonsisten. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya dilakukan lebih banyak di daerah perkotaan, sehingga studi tentang PBB di daerah pedesaan masih terbatas. Berdasarkan hal ini, terdapat kesenjangan penelitian, baik dari segi hasil yang inkonsisten maupun keterbatasan lokasi dan subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini fokus ditingkat desa, yaitu Desa Lakekun, untuk sekaligus mengkaji pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pajak daerah dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pendekatan yang lebih komprehensif, khususnya di daerah pedesaan.

KAJIAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan pertama kali oleh Fritz Heider. Heider menyatakan bahwa teori atribusi adalah sebuah pendekatan yang memaparkan pemicu perilaku seseorang, baik diri sendiri maupun orang lain, yang bergantung pada apakah tindakan itu mendapatkan pengaruh oleh faktor di dalam diri (internal) atau faktor yang bersumber dari luar (eksternal). Tahapan Proses Atribusi:

- 1) Persepsi (Perception): Mengamati perilaku seseorang.
- 2) Penilaian Tujuan (Judgment of Intention): Menilai apakah suatu perilaku dilakukan dengan sengaja.
- 3) Atribusi (Attribution): Menentukan penyebab perilaku internal (orangnya) atau eksternal (situasinya).

Menurut Kahono (2003), perilaku yang muncul dari dalam diri seseorang adalah tindakan yang dianggap berada dalam kendali pribadi seseorang itu, sementara perilaku yang

dipengaruhi oleh faktor luar adalah tindakan yang terpengaruh oleh kondisi eksternal, yang berarti individu terpaksa bertindak karena keadaan di sekitarnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan antara teori atribusi dan penelitian ini berada pada dampaknya terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak, melalui cara mereka memahami faktor-faktor yang menyebabkan perilaku patuh atau tidak patuh. Ketika wajib pajak menganggap kepatuhan sebagai hasil dari kesadaran diri atau nilai-nilai pribadi (faktor internal), mereka cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika mereka memandang ketidakpatuhan sebagai akibat faktor eksternal, seperti kompleksitas sistem perpajakan atau ketidakadilan sanksi, maka tingkat kepatuhan mereka mungkin menurun.

Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan bagi individu atau entitas yang mempunyai hak atas atau memperoleh manfaat dari tanah dan bangunan tersebut (Sihombing & Sibagariang, 2020:81).

PBB adalah satu di antara jenis penerimaan negara melalui pajak, wajib pajaknya adalah individu dan/atau entitas yang mempunyai aset berupa tanah serta/atau bangunan. PBB dipungut sekali dalam setahun.

Objek PBB Perdesaan & Perkotaan yakni tanah serta/atau Bangunan yang dipunya, dikuasai, serta/atau dipergunakan oleh orang pribadi atau Badan, terkecuali bagi wilayah yang dipergunakan dalam aktivitas usaha perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Subjek PBB Perdesaan & Perkotaan yakni orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak sah atas Tanah dan/atau mendapatkan manfaat dari Tanah, serta/atau mempunyai, menguasai, serta/atau mendapatkan manfaat dari bangunan.

Sesuai Perda Kab. Malaka No. 30 Tahun 2021 mengenai Pajak Daerah, pengaturan tarif pajak NJOP maksimum Rp 1.000.000.000,00 ditentukan sejumlah 0,1% setiap tahunnya, sedangkan untuk NJOP yang melebihi Rp 1.000.000.000,00 ditentukan sejumlah 0,2% per tahun.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan yang dilihat sebagai perilaku positif dianggap sebagai suatu pilihan, yang berarti bahwa seseorang mengambil keputusan untuk bertindak, mentaati, menanggapi secara kritis pada peraturan, hukum, norma sosial, permintaan, atau keinginan dari individu berotoritas atau andil besar (Rahmawati, 2015).

Kepatuhan dalam konteks perpajakan berarti mengikuti dan menghormati peraturan perpajakan yang ada. Kepatuhan wajib pajak merujuk pada Gunadi (2013) didefinisikan sebagai kemauan mereka dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka berdasarkan pada peraturan yang ada tanpa harus pemeriksaan, penyelidikan secara keseluruhan, peringatan, atau ancaman, serta pengaplikasian sanksi baik yang bersifat hukum maupun administratif.

Merujuk pada Permenkeu No.: 74/PMK.03/2012, tolak ukur kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Menyampaikan SPT tepat waktu.
- 2) Tidak memiliki utang pajak, terkecuali jika sudah mendapat izin membayar dengan cara cicilan atau menunda kewajiban membayar pajak.
- 3) Tidak pernah dihukum sebab tindak pidana pajak sesuai putusan pengadilan yang mengikat secara hukum pada lima tahun terakhir.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah usaha serta proses untuk memberi informasi pajak guna menciptakan perubahan dalam wawasan, kemampuan, serta sikap masyarakat, pelaku usaha, pejabat, dan lembaga pemerintah maupun swasta sehingga mereka terdorong untuk memahami, menyadari, peduli, serta berpartisipasi untuk memenuhi kewajiban pajak. Merujuk pada Jumiarti (2012), melaksanakan sosialisasi pada masyarakat terkait PBB sangat penting guna menaikkan kesadaran, pemahaman, serta komitmen wajib pajak atau masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka membayar pajak. Agar kegiatan sosialisasi perpajakan lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan secara terencana,

terstruktur, terarah, terukur, dan berkesinambungan.

Merujuk pada Herryanto dan Toly dalam Nareswari (2019), sosialisasi pajak bisa dilaksanakan melalui 2 cara berikut:

- 1) Sosialisasi langsung adalah aktivitas pengenalan mengenai pajak yang melibatkan interaksi langsung bersama para wajib pajak atau calon wajib pajak, misal seminar, lokakarya, kompetisi pajak misalnya kuis, debat, dan lain-lain.
- 2) Sosialisasi tidak langsung adalah aktivitas pengenalan mengenai pajak untuk masyarakat dengan sedikit atau tanpa interaksi bersama peserta, contohnya melalui media elektronik media cetak.

Kesadaran Wajib Pajak

Merujuk pada Rahayu (2020), kesadaran wajib pajak yakni kapabilitas dalam menjalankan kewajiban pajak dengan tepat melalui wawasan serta pemahaman yang wajib pajak miliki yang muncul saat mereka memahami makna, fungsi, serta tujuan pembayaran pajak. Usaha dalam menaikkan kesadaran masyarakat mengenai urgensi membayar pajak, dapat dilakukan melalui cara mensosialisasikan pentingnya pajak, memudahkan proses pembayaran pajak, mengingatkan wajib pajak tentang kewajiban yang harus mereka bayar, serta menegakkan hukum bagi yang melanggar aturan pajak. Petugas pajak diharapkan senantiasa memberi pelayanan yang baik, adil, serta tegas pada para wajib pajak.

Sejumlah jenis kesadaran pajak yang menstimulus wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya adalah meliputi:

- 1) Kesadaran bahwasanya pajak yakni cara untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan memahami hal ini, wajib pajak tidak keberatan dalam membayarnya sebab merasa tidak mendapat kerugian.
- 2) Kesadaran bahwasanya mengulur pembayaran pajak serta meminimalkan beban pajak amat membawa kerugian negara. Wajib pajak memiliki kesediaan untuk membayarkan pajak sebab paham

bahwasanya menunda pembayaran pajak serta mengurangi beban pajak dapat menyebabkan minimnya dana, yang bisa menghalangi pembangunan nasional.

- 3) Kesadaran bahwa pajak ditentukan sesuai dengan hukum serta bisa ditegakkan. Wajib pajak bisa membayar sebab menyadari bahwasanya pembayaran pajak mempunyai landasan hukum yang kuat.

Kesadaran adalah aspek di diri manusia untuk memahami realitas serta seperti apa mereka berperilaku serta bersikap pada sesuatu yang nyata. Makin besar tingkat kesadaran wajib pajak, makin bagus pemahaman serta pemenuhan kewajiban pajak mereka, yang kemudian bisa menaikkan kepatuhan. Kesadaran memiliki fungsi yang sangat utama untuk wajib pajak sebab bisa mendorong mereka untuk berperan aktif mulai dari perhitungan hingga pelaporan kewajiban pajak secara pribadi dengan tepat dan relevan dengan peraturan yang ada (Nugroho & Kurnia, 2020).

Sanksi Pajak

Pranadata (2014) mengatakan bahwa sanksi pajak adalah alat kendali yang memastikan wajib pajak terus menjalankan kewajiban pajaknya sebab kerugian yang hendak ditanggung wajib pajak bila tidak membayar pajak, secara otomatis mendorong mereka untuk memikirkan kembali keinginan mereka terkait kewajiban pajak. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang tidak taat serta kurang disiplin untuk melaksanakan pembayaran pajak berdasarkan pada ketetapan yang ada, seperti wajib pajak lalai ataupun terlambat untuk membayarkan pajaknya yang melewati jadwal yang sudah ditentukan. Selain langkah-langkah yang bersifat menghukum, penerapan sanksi administratif juga berperan signifikan untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini, yang bisa berbentuk denda atau peningkatan tarif pajak, bukan saja berperan menjadi pencegah, tapi juga menjadi cara untuk mendorong disiplin di kalangan wajib pajak, sehingga mereka termotivasi untuk menjalankan kewajiban mereka dengan akurat dan sesuai waktu (Anwar & Suparno, 2024).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, jenis sanksi, meliputi:

- 1) Sanksi administrasi seperti bunga, denda ataupun kenaikan.
- 2) Sanksi pidana seperti kurungan atau penjara.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Studi ini mempergunakan data kuantitatif. Merujuk pada Sugiyono (2019), data kuantitatif yakni data berupa angka/data kualitatif yang telah diubah menjadi angka (diberi skor). Data kuantitatif pada studi ini ialah angka-angka yang bersumber dari skor jawaban responden, yang kemudian dianalisis menggunakan metode statistik.

Tempat dan Waktu Penelitian

Studi ini hendak dilaksanakan di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka sebagai objek penelitian. Mengenai waktu pelaksanaannya, penelitian ini berlangsung dari 12 November 2025 sampai selesai.

Populasi

Populasi yang diteliti ialah para wajib pajak di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka yang berjumlah 899 wajib pajak atas objek bumi dan bangunan.

Sampel

Sampel yakni sebagian dari total serta karakteristik yang populasi miliki; sampel yang dipilih dari populasi perlu representatif atau mencerminkan populasi yang sedang diteliti (Sugiyono, 2019:127). Dalam Penelitian ini diterapkan metode *simple random sampling*. Ukuran sampel ditetapkan dengan mengaplikasikan rumus Slovin:

$$n = \frac{n}{1 + N (e)^2}$$

Ket:

N = ukuran populasi.

n = total sampel yang digunakan.

e = Persentase kesalahan yang dapat ditoleransi (*Margin of error*) 10%

Penggunaan margin of error 10% disebabkan oleh keterbatasan penelitian ini dalam menjangkau semua wajib pajak di Desa Lakekun. Oleh karena itu, diperlukan ukuran sampel yang lebih realistis, namun tetap dapat mewakili populasi dengan baik. Berikut perhitungan sampelnya berdasarkan rumus yang dipaparkan:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{899}{1 + 899(0,1)^2}$$

$$n = \frac{899}{1 + 8,99}$$

$$n = \frac{899}{9,99}$$

n = 89,98 dibulatkan menjadi 90

Sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan, dengan demikian sampel yang dipergunakan di studi ini ada 90 wajib pajak PBB di Desa Lakekun, Kec. Kobalima, Kab. Malaka.

Sumber Data

Sumber data yang dipakai ialah data primer, yakni sumber data secara langsung menyediakan data pada pengumpul data (Sugiyono, 2019). Data primer yang dipergunakan ialah jawaban langsung dari wajib pajak terhadap kuesioner yang disebarkan.

Teknik Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

Proses uji ini dilakukan terlebih dahulu agar hasil yang didapat layak digunakan. Dalam praktiknya, terdapat tiga uji asumsi klasik, yakni uji normalitas, multikolonieritas, serta heteroskedastisitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji ini memiliki tujuan menentukan apakah model regresi ditemui danya korelasi antar variabel X atau variabel Y (Ghozali, 2018:157). Efek dari multikolonieritas yakni memicu variabilitas yang tinggi dalam sampel. Ini berarti standar error yang besar, dan sebagai hasilnya, saat koefisien diuji, nilai t akan lebih kecil daripada nilai t-tabel. Ini memperlihatkan ketiadaan korelasi linier antara variabel X yang terpengaruh dan variabel Y. Guna memeriksa terdapat atau tidak multikolonieritas dalam model regresi bisa tampak dari nilai *tolerance* serta nilai VIF. Nilai ambang yang dipergunakan yakni untuk nilai *tolerance* di bawah 0,10 atau nilai VIF melebihi 10.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji ini memiliki tujuan untuk memeriksa apakah terdapat ketidaknyamanan varian dari residu dari sebuah observasi dengan observasi lain pada model regresi. Bila variannya berbeda, hal ini disebut heteroskedastisitas. Uji ini bisa dilaksanakan melalui uji glejser. Pada Uji Glejser, nilai sig. untuk setiap variabel akan diperoleh. Jika nilai signifikansi > 0,05, dengan demikian variabel tersebut tidak heteroskedastis. Model penelitian yang ideal ialah yang bebas dari masalah heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

4. Model Regresi Linear Berganda

Analisis ini dipergunakan dalam menentukan korelai antara variabel X, apakah setiap variabel terkait secara positif atau negatif, guna memperkirakan nilai serta variabel X apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Dengan demikian, analisis regresi linier berganda dapat diuraikan dalam persamaan ini:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Ket:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

x₁ = Sosialisasi pajak

x₂ = Kesadaran wajib pajak

x₃ = Sanksi pajak

b = Koefisien regresi

e = Standar error/residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

5. Uji t

Uji ini mengungkapkan sejauh mana dampak satu variabel X secara parsial mempengaruhi variasi variabel Y (Ghozali, 2018). Sejumlah langkah untuk melakukan uji statistik t adalah:

- 1) Menetapkan hipotesis
- 2) Menentukan nilai α yaitu 0,05.
- 3) Melaksanakan uji serta mendapatkan nilai Sig t.
- 4) Pembuatan keputusan bisa dicermati melalui tabel *coefficients* dengan mencermati nilai sig, di mana:
 - a) Bila nilai Sig < α 0.05, variabel X memberi pengaruh variabel Y.
 - b) Bila nilai Sig > α 0.05, variabel X tidak mempengaruhi variabel Y.

6. Uji F

Uji ini mengungkapkan apakah variabel X pada model memberikan dampak secara bersamaan pada variabel Y. merujuk pada Ghozali (2018), uji statistik F ialah uji hipotesis guna memeriksa keabsahan model regresi untuk menjadi alat analisis.

7. Koefisien Determinasi

memiliki tujuan untuk memeriksa sejauh mana kapabilitas model untuk menjelaskan variasi variabel Y. Nilai koefisien determinasi kisaran antara 0 serta 1 ($0 < R_2 < 1$). Bila R_2 yang didapatkan hampir dekat dengan 1, dengan demikian model lebih kuat untuk memaparkan variabel X terkait dengan variabel Y; kebalikannya, bila R_2 yang diperoleh mendekati 0, dengan demikian model lebih lemah dalam menjabarkan variabel independen terkait dengan variabel Y (Ghozali, 2018).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil uji normalitas

		Unstandardized Residual
N		90
Normal	Mean	,0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2,37880526
Most	Absolute	,087
Extreme	Positive	,087
Differences	Negative	-,040
Test Statistic		,087
Asymp. Sig. (2-tailed)		,089 ^c

Hasil uji normalitas memperlihatkan bahwa data residu dari model regresi mempunyai distribusi secara normal sebab nilai Asymp. Sig. (2-tailed) mencapai $0.89 > 0,05$.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Sosialisasi pajak (X ₁)	0,940	1,064
Kesadaran wajib pajak (X ₂)	0,661	1,512
Sanksi pajak(X ₃)	0,633	1,580

Perolehan uji multikolinearitas memperlihatkan bahwasanya tidak ada variabel X yang menunjukkan adanya multikolinearitas. Ini karena semua nilai *Tolerance* > 0,10 serta nilai VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil uji heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	4,269	2,534		1,685	,096
X1	-,004	,058	-,008	-,071	,944

X2	-,073	,060	-,159	-	,22
				1,21	7
				6	
X3	,006	,060	,012	,092	,92
					7

Perolehan uji heteroskedastisitas memperlihatkan bahwasanya nilai sig. bagi tiap variabel > 0,05, dengan demikian bisa ditarik simpulan bahwasanya seluruh variabel X terbebas dari persoalan heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R₂)

Tabel 4. Hasil uji koefisien determinasi (R₂)

Model Summary ^b				
Mo del	R	R ²	Adjusted R ²	Std. Error of the Estimate
1	,521 ^a	,272	,246	2,420

Perolehan uji R₂ dalam studi ini memperoleh nilai adjusted R₂ 0,246 atau 24,6%. Ini memperlihatkan bahwasanya kepatuhan wajib pajak mendapatkan pengaruh variabel sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak sejumlah 24,6%, sedangkan sisanya yang sejumlah 75,4% mendapatkan pengaruh oleh sejumlah faktor lain yang tidak termasuk di studi ini seperti pengetahuan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi ekonomi, serta tingkat pendidikan wajib pajak.

Uji Hipotesis
Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil uji t

Variabel	B	Beta	Sig.
(Constant)	14,232		,001
X1	,128	,126	,188
X2	,233	,265	,022
X3	,250	,288	,015

$$Y = 14,232 + 0,126 X1 + 0,265 X2 + 0,288 X3 + e$$

1. Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak koefisien regresinya yakni 0,126 bernilai sig sejumlah 0,188 > 0,05. Ini menandakan bahwasanya sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil ini

sejalan dengan temuan studi Hidayat dan Islami (2019) yang menjabarkan bahwasanya sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak pada hal pembayaran PBB. Studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sosialisasi mengenai PBB sudah dilakukan, masih banyak wajib pajak yang kurang berminat untuk menjalani program sosialisasi itu.

Dalam konteks teori atribusi, sosialisasi pajak adalah faktor eksternal yang pengaruhnya terbatas jika tidak diinternalisasi sebagai tanggung jawab pribadi. Perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal cenderung tidak bertahan lama, sementara faktor internal lebih konsisten. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kepatuhan wajib pajak lebih dipengaruhi faktor internal seperti kesadaran diri, pengalaman perpajakan atau kebutuhan administrasi tertentu, daripada sosialisasi pajak.

Tujuan dari sosialisasi pajak yakni guna memberi wawasan serta pemahaman pada masyarakat terkait hak serta kewajiban perpajakan, serta menaikkan kesadaran mereka akan utamanya sumbangsih pajak bagi pembangunan negara. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat terkait perpajakan (Ermadiana dkk., 2023).

2. Kesadaran Wajib Pajak

Koefisien regresi kesadaran wajib pajak yakni 0,265 bernilai sig. 0,022 < 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil dari kajian dilihat dari teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal yang melekat pada wajib pajak, seperti sikap, nilai, dan tanggung jawab pribadi. Ketika wajib pajak melihat kewajiban membayar pajak sebagai tanggung jawab pribadi, kepatuhan pajak akan muncul secara sukarela dan berkelanjutan.

Temuan studi ini relevan dengan studi sebelumnya oleh Hidayat dkk. (2023), yang menunjukkan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi itu memperlihatkan bahwasanya wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi relatif lebih patuh untuk

menjalankan kewajiban pajak mereka, termasuk dalam pembayaran PBB. Sebagai hasilnya, usaha menaikkan kepatuhan wajib pajak perlu diarahkan pada kenaikan kesadaran wajib pajak melalui edukasi perpajakan yang terus menerus, penyampaian informasi yang akurat serta mudah dipahami, serta penanaman rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

3. Sanksi Pajak

Koefisien regresi sanksi pajak yakni 0,288 bernilai sig. 0,015 < 0,05. Ini mengindikasikan bahwasanya sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil studi dilihat dari teori atribusi, sanksi pajak adalah faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak biasanya mematuhi kewajiban pajak karena menganggap perilaku patuh tersebut sebagai cara untuk menghindari konsekuensi negatif seperti denda atau sanksi.

Temuan dari studi ini relevan dengan temuan riset sebelumnya yang dilaksanakan Hidayat & Islami (2019) serta Siregar & Rahayu (2018), di mana mereka menemukan bahwasanya sanksi pajak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi tersebut memperlihatkan bahwasanya semakin ketat penegakan sanksi pajak, makin besar kemungkinan wajib pajak agar patuh, termasuk dalam hal pembayaran PBB. Dengan demikian, implementasi sanksi pajak yang tegas, adil, serta konsisten harus selalu ditingkatkan sebagai langkah untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya menyadari kewajiban pajaknya.

Hasil perhitungan yang sudah dilaksanakan menghasilkan nilai sig. 0,000 < 0,05, dengan demikian mampu ditarik simpulan sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak secara bersamaan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tanah serta bangunan. Ditinjau dari teori atribusi, perilaku individu dipengaruhi oleh atribusi terhadap faktor internal dan faktor eksternal. Pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak merupakan faktor internal dari diri wajib pajak, sedangkan sosialisasi pajak serta sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan dan kebijakan pemerintah.

Temuan studi ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilaksanakan Hidayat dkk. (2023), yang menemukan bahwasanya sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak secara bersamaan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Studi tersebut menemukan bahwasanya kepatuhan terhadap pajak akan lebih baik jika faktor internal dan faktor eksternal digabungkan secara bersamaan.

Selain itu, hasil dari uji secara bersamaan atau secara simultan ini juga mengungkapkan adanya perbedaan hasil pada uji secara terpisah atau secara parsial, di mana terdapat variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan secara individu. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah variabel tidak terlihat kuat secara terpisah, saat digabungkan dengan variabel lain, variabel tersebut tetap memberikan kontribusi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Perilaku individu akan lebih stabil dan berkelanjutan apabila didorong oleh faktor internal, namun faktor eksternal tetap memiliki peran penting sebagai pendorong dan penguat perilaku karena faktor eksternal dapat menciptakan konteks yang mendukung motivasi internal, sehingga memfasilitasi perubahan perilaku yang lebih efektif dan berkelanjutan (Habsy dkk., 2023). Pada penelitian ini, kesadaran wajib pajak mendorong kepatuhan secara sukarela, sementara sosialisasi pajak memberikan pemahaman dan sanksi pajak bertindak untuk menjadi alat pengendalian dalam memastikan bahwa wajib pajak tetap mematuhi aturan perpajakan.

Uji F

Tabel 6. Hasil uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	188,030	3	62,677	10,703	,000 ^b
Residual	503,626	86	5,856		
Total	691,656	89			

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sosialisasi pajak tidak memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak. Studi ini menandakan bahwasanya kenaikan frekuensi atau intensitas sosialisasi mengenai pajak yang dilakukan belum membantu secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat Desa Lakekun terhadap pembayaran PBB. Dengan kata lain, upaya sosialisasi yang telah dilakukan sejauh ini belum berhasil menstimulus wajib pajak agar lebih taat membayar pajak mereka.

Kesadaran wajib pajak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Ini maknanya bahwasanya makin besar kesadaran wajib pajak, makin besar kemungkinan wajib pajak akan membayarkan pajak sesuai dengan waktunya. Untuk itu, tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Lakekun dalam membayarkan PBB meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak pada kewajiban pajaknya.

Sanksi pajak memberi pengaruh kepatuhan wajib pajak. Ini memperlihatkan bahwasanya penegakan sanksi pajak yang tegas berkaitan erat dengan peningkatan kepatuhan, sehingga semakin ketat dan jelasnya penerapan sanksi terhadap keterlambatan atau kelalaian membayar pajak, makin besar tingkat kepatuhan wajib pajak Desa Lakekun. Adanya sanksi ataupun denda yang diketahui oleh wajib pajak berperan menjadi motivasi supaya wajib pajak lebih taat pada kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak serta sanksi pajak, secara simultan memberi pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Variabel X sosialisasi pajak, kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak bisa menjabarkan sebagian variasi pada kepatuhan wajib pajak. Kemudian, sebagian besar variasi pada kepatuhan wajib pajak mendapatkan pengaruh oleh faktor-faktor yang tidak dikaji di studi ini, seperti pengetahuan pajak, tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah, kondisi ekonomi wajib pajak, serta tingkat pendidikan wajib pajak. Oleh karena itu, meskipun sosialisasi, kesadaran, serta sanksi terbukti memberi pengaruh bersamaan, hasil penelitian ini menekankan bahwa langkah-

langkah untuk meningkatkan kepatuhan pajak harus dilakukan dengan cara yang lebih menyeluruh dengan mempertimbangkan beragam faktor lain di luar variabel yang sudah dikaji agar tingkat ketaatan para wajib pajak dapat ditingkatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Saran

Untuk peneliti berikutnya yang ingin meneliti kepatuhan wajib pajak PBB dianjurkan untuk melanjutkan studi ini dengan menambahkan beragam variabel lain yang belum diteliti, karena temuan studi memperlihatkan bahwasanya terdapat beragam faktor signifikan yang memberi dampak pada kepatuhan wajib pajak di luar sosialisasi, kesadaran, serta sanksi pajak. Selain itu, studi selanjutnya juga bisa dilaksanakan di wilayah atau desa yang tidak sama, dengan demikian temuan studi mempunyai generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng* [Skripsi]. Universitas Negeri Islam Alauddin Makassar.
- Anwar, S. N. M. A., & Suparno, S. (2024). Penerapan peraturan dan sanksi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan formal wajib pajak besar di kantor pelayanan pajak madya semarang. *Jurnal Suara Keadilan*. <https://doi.org/10.24176/sk.v24i1.11063>
- Ermadiana, Mukhis, Hidayat, A., & Kesuma, N. (2023). Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Tentang Pentingnya Membayar Pajak di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Saka Tiga. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS*, 1(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.59407/jpk2.v1i5.125>

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan Edisi 2013*. Bee Media.
- Habsy, B. A., Santoso, H. R. P., Nurfirda, I., & Putri, C. K. (2023). Motivasi sebagai Kunci Peran dalam Pendidikan. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, 4(2).<https://doi.org/https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i2.2335>
- Hidayat, F., Lasmini, L., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Telukjambe Timur. *Journal Of Social Science Research* , 3(5).
- Hidayat, R. A. I., & Islami, I. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Accounting Global Journal*, 3(2).
- Jumiarti, V. (2012). Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara. *Jurnal Publika*, 1(1).
- Kahono, S. (2003). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris Di Wilayah KP. PBB Semarang)* [Doctoral Dissertation]. Universitas Diponegoro.
- Nadeak, F. F. (2025). Kenapa Dunia Perpajakan RI Masih Penuh Masalah? *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250327062428-532-1213507/kenapa-dunia-perpajakan-ri-masih-penuh-masalah>
- Nareswari, N. P. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Yogyakarta* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Nugroho, V. Q., & Kurnia. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 9(1).
- Pranadatta, I. G. P. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Dan Pelaksanaan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu* [Skripsi Thesis, Universitas Brawijaya]. Universitas Brawijaya Repository. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/107151/>
- Putra, A. S. (2025). Meng-Counter Urbanisasi Dengan Paradiplomasi (Studi Kasus: Pemerataan Pembangunan di Indonesia). *Jamparing*, 3(1), 797–803.<https://doi.org/10.57235/jamparing.v3i1.5470>
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Edisi Revisi*. Rekayasa Sains.
- Rahmawati, A. D. (2015). *Kepatuhan Santri Terhadap Aturan Di Pondok Pesantren Modern*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan Teori Dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Siregar, O. K., & Rahayu, S. A. (2018). Pengaruh Sanksi, Kualitas Pelayanan Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Pantai Gemi Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo, Ed.; 2 ed.). ALFABETA.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 6(2).

PENGARUH LITERASI KEUANGAN, PENGGUNAAN SHOPEE PAYLATER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF BELANJA ONLINE DI SHOPEE (IBU PKK DESA DUKUH MADUREJO)

Lia Nur Fadhilah
Universitas Nusa Cendana
lia.fadhilah@staff.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan penggunaan Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif belanja online pada ibu rumah tangga yang tergabung dalam PKK Desa Dukuh Madurejo. Perkembangan e-commerce yang disertai kemudahan sistem pembayaran digital mendorong perubahan pola konsumsi, khususnya melalui fitur paylater yang memungkinkan pembelian tanpa pembayaran langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 100 responden yang aktif berbelanja di platform Shopee dan menggunakan Shopee PayLater dalam enam bulan terakhir. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif ibu rumah tangga. Selain itu, penggunaan Shopee PayLater juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa literasi keuangan dan penggunaan Shopee PayLater mampu menjelaskan perilaku konsumtif sebesar 24,2%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan literasi keuangan dan penggunaan paylater yang bijak menjadi faktor penting dalam mengendalikan perilaku konsumtif, khususnya di kalangan ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga.

Kata kunci : Literasi Keuangan, Penggunaan Shopee Paylater, Perilaku Konsumtif

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial literacy and the use of Shopee PayLater on the online shopping consumer behavior of housewives who are members of the PKK (Family Welfare Movement) in Dukuh Madurejo Village. The development of e-commerce accompanied by the convenience of digital payment systems encourages changes in consumption patterns, particularly through the PayLater feature that allows purchases without direct payment. This study uses a quantitative approach with a survey method. Data were collected through questionnaires from 100 respondents who actively shopped on the Shopee platform and used Shopee PayLater in the last six months. The data analysis technique was carried out using multiple linear regression with the help of SPSS version 23. The results showed that financial literacy has a positive and significant effect on the consumer behavior of housewives. In addition, the use of Shopee PayLater was also proven to have a positive and significant effect on consumer behavior. The coefficient of determination value shows that financial literacy and the use of Shopee PayLater are able to explain consumer behavior by 24.2%, while the rest is influenced by other factors outside the research model. These findings indicate that increasing financial literacy and wise use of paylater are important factors in controlling consumer behavior, especially among housewives as family financial managers.

Keywords : Financial Literacy, Use of Shopee Paylater, Consumptive Behavior

PENDAHULUAN

Perubahan yang ada saat ini sangat dinamis, dimana perkembangan teknologi digital membawa perubahan yang signifikan. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Jumlah Penduduk Terkoneksi Internet 2021- 2022) menunjukkan bahwa total pengguna internet di Indonesia hingga tahun 2022 mencapai 210 juta dengan persentase 77,02% dari jumlah total populasi sebanyak 272 Juta (*Profil Internet Indonesia*, 2022). Sehingga perkembangan internet yang awalnya menjadi alat komunikasi jarak jauh berubah menjadi kebutuhan social yang harus di penuhi (Fatmawati, 2020).

Hal ini juga terlihat dengan semakin populernya dan berkembangnya platform pembelian online atau e-commerce yang ada,serta mengubah kebiasaan dengan melakukan berbelanja online (Olii et al., 2020).

Salah satu e-commerce yang di gunakan ibu-ibu adalah Shopee. Shopee dianggap sangat memudahkan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan mereka serta disisi lain memudahkan penjual dalam menjangkau pembeli dengan jarak yang jauh (Maulana et al., 2021). Shopee tidak hanya sebagai suatu perantara dalam bertransaksi, tetapi juga bertanggungjawab atas proses pemasaran, penjualan, pengiriman, serta pelayanan bagi para pelanggan (Ayu & Lahmi, 2020).

Salah satu inovasi yang turut mendorong perilaku konsumtif di ranah belanja online adalah kemudahan akses belanja online. Kemudahan ini salah satunya dengan didukung berbagai fitur pembayaran inovatif seperti Shopee PayLater atau dengan kata lain ini memudahkan konsumen untuk belanja terlebih dahulu bayar di akhir. Selain itu tersedianya produk yang semakin bervariasi di Shopee memicu ibu-ibu untuk membeli produk-produk yang kurang dibutuhkannya. Kemudahan ini turut mengubah perilaku konsumen, dimana fenomena ini sangat relevan di kalangan ibu rumah tangga yang, selain sebagai pengelola keuangan keluarga, juga menjadi target utama berbagai promosi daring (I. C. Putri et al., 2023). Apabila perilaku ini tidak dikendalikan, dapat menimbulkan perilaku konsumtif, yaitu perilaku membeli produk dengan lebih

mengutamakan keinginan daripada kebutuhan (Ahmad, 2022).

Perilaku konsumtif merupakan gaya hidup yang suka membelanjakan uang tanpa menimbang dengan matang dengan tujuan untuk memenuhi keinginan pribadi semata dan bukan lagi atas tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang dijadikan pemenuhan gaya hidup untuk bisa tampil mewah (Insana & Johan, 2020). Berdasarkan observasi yang ditemukan di lapangan bahwa konsumsi barang melalui belanja online bagi kalangan ibu-ibu saat ini adalah fenomena nyata yang selalu menjadi pembicaraan hangat pada berbagai kesempatan. Literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mengendalikan perilaku konsumtif, karena pengetahuan dan pemahaman terkait pengelolaan keuangan dapat membantu individu membuat keputusan pembelian yang lebih rasional dan terencana. Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah dapat meningkatkan kecenderungan perilaku konsumtif, terutama ketika dihadapkan pada kemudahan bertransaksi dan tawaran promo yang menarik di platform e-commerce (M. R. A. Putri & Putri, 2024).

Ibu rumah tangga yang memiliki literasi keuangan rendah cenderung lebih mudah terdorong untuk melakukan pembelian impulsif, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan finansial. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang baik dapat membantu individu mengendalikan perilaku konsumtif dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijaksana.(Diskhamarzaweny et al., 2022). Sebaliknya, rendahnya literasi keuangan sering kali menyebabkan perilaku konsumtif yang impulsif, di mana konsumen cenderung membeli barang yang tidak dibutuhkan hanya karena tergiur promo atau kemudahan pembayaran (Diskhamarzaweny et al., 2022).

Selain faktor literasi keuangan, penggunaan Shopee PayLater juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Kemudahan akses kredit instan dan penundaan pembayaran sering kali mendorong konsumen untuk membeli barang di luar kebutuhan, demi memanfaatkan promo atau diskon yang ditawarkan (Aftika & Yulistia,

n.d.). Selain itu penggunaan Shopee PayLater berhubungan positif dengan peningkatan perilaku konsumtif, baik pada generasi muda maupun pada ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga.

Fenomena ini menjadi perhatian penting, mengingat perilaku konsumtif yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif pada kondisi keuangan individu, seperti terjebak dalam utang atau kesulitan mengelola pengeluaran bulanan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana literasi keuangan dan penggunaan Shopee PayLater secara simultan memengaruhi perilaku konsumtif berbelanja online, khususnya di kalangan pengguna Shopee. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan penggunaan Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif berbelanja online di Shopee pada ibu rumah tangga (N. Putri, 2023).

KAJIAN TEORI

Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku individu dalam mengelola keuangan pribadi sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang tepat dan meningkatkan kesejahteraan finansial ((OJK), 2025). Literasi keuangan sebagai keterampilan yang harus dimiliki setiap individu untuk memperbaiki taraf hidup melalui pengelolaan produk dan jasa keuangan secara tepat. Sementara itu, Chen dan Volpe (1998) mengartikan literasi keuangan sebagai pengetahuan untuk mengelola keuangan agar bisa hidup lebih sejahtera di masa yang akan datang.

Literasi keuangan penting untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan, mengelola keuangan secara sehat, dan mencapai kesejahteraan finansial (Diskhamarzeweny et al., 2022). Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 66,46% dari 65,43% pada tahun sebelumnya, dengan inklusi keuangan mencapai 80,51%

((OJK), 2025). Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan memadai, sehingga edukasi berkelanjutan sangat diperlukan.

Literasi keuangan adalah kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan berbagai konsep dan informasi keuangan secara efektif dalam pengambilan keputusan keuangan sehari-hari. Literasi keuangan yang baik diharapkan dapat menekan perilaku konsumtif yang berlebihan dan tidak rasional (Tribuana, 2020), (Siagian et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara literasi keuangan dan perilaku konsumtif. literasi keuangan yang tinggi cenderung menurunkan perilaku konsumtif, sedangkan literasi keuangan yang rendah dapat meningkatkan perilaku konsumtif (Dewi et al., 2017). Hal ini sesuai dengan teori behavioristik yang menyatakan bahwa pembelajaran literasi keuangan dapat mengubah perilaku konsumtif menjadi lebih rasional. Secara umum, literasi keuangan berkontribusi cukup besar dalam menjelaskan variabilitas perilaku konsumtif, dengan nilai kontribusi yang dilaporkan bervariasi antara 38% hingga 61,5% pada beberapa studi (Dewi et al., 2017).

Shopee Paylater

Shopee Paylater adalah fitur pembayaran yang memungkinkan pelanggan melakukan pembelian dengan sistem kredit atau cicilan tanpa harus membayar secara langsung terlebih dahulu. Fitur ini merupakan hasil kerja sama antara Shopee International Indonesia dengan perusahaan fintech seperti PT Commerce Finance dan PT Lentera Dana Nusantara yang diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tujuan dari Shopee PayLater adalah untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan yang sedang bertransaksi di platform Shopee.

Fitur Shopee PayLater mulai diperkenalkan pada maret 2019. Shopee menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan untuk memberikan layanan kredit ini. Beberapa dari perusahaan tersebut antara lain PT. Lentera Dana Nusantara, yang bertanggung jawab atas administrasi kredit dan

pinjaman peer-to-peer (P2P) berbasis inovasi, PT. Trade Finance, yang fokus pada lembaga keuangan, dan pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan PT. Lentera Dana Nusantara atau PT. Trade Finance untuk menyediakan uang muka kepada klien.

Shopee Paylater menawarkan pinjaman secara instan atau cepat dengan bunga dan biaya admin yang bersaing. Dimana dalam aplikasi Shopee Paylater pengguna dapat memilih tenor cicilan mulai dari 3, 6, hingga 12 bulan sesuai kebutuhan. Limit pinjaman awal biasanya sekitar Rp 750.000 dengan seiring berjalannya waktu kemungkinan terdapat penambahan limit dimana semakin banyak transaksi dan record baik pembayaran Shopee akan mempengaruhi limit pinjaman. Dana pinjaman ini hanya dapat digunakan untuk transaksi di platform Shopee dan tidak bisa dicairkan secara tunai. Fitur ini memberikan kemudahan bagi konsumen yang belum memiliki dana cukup namun membutuhkan barang segera. Namun, kemudahan ini juga berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif, khususnya pada kalangan mahasiswa dan karyawan.

Penelitian menunjukkan bahwa fitur Shopee Paylater berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif berbelanja online, karena pengguna terdorong untuk berbelanja lebih banyak tanpa harus membayar langsung. Selain itu, faktor sosial, gaya hidup, dan literasi keuangan juga mempengaruhi penggunaan Shopee Paylater dan perilaku konsumtif penggunanya. Pengaruh sosial yang tinggi, seperti rekomendasi dari orang sekitar, dapat meningkatkan penggunaan fitur ini (Leonita & Wulandari, 2024). Kemudahan ini mendorong pengguna untuk melakukan pembelian berlebihan, terutama produk fashion dan kebutuhan konsumtif lainnya, yang berpotensi menyebabkan kebiasaan berhutang dan kesulitan mengatur keuangan (Julita et al., 2022).

Ibu rumah tangga cenderung mudah terpengaruh untuk berbelanja, terutama dengan adanya metode pembayaran Paylater yang mempermudah transaksi tanpa pembayaran langsung. Hal ini dapat memperkuat perilaku konsumtif karena kemudahan akses kredit

tanpa bunga langsung, sehingga menimbulkan pembelian. Ibu rumah tangga dengan literasi keuangan rendah dan kontrol diri yang kurang cenderung lebih mudah terjebak dalam perilaku konsumtif melalui penggunaan Paylater.

Perilaku konsumtif

Perilaku konsumtif mencerminkan status sosial dan keinginan untuk memamerkan diri, yang sering kali mengarah pada pengembangan gaya hidup dan perilaku konsumsi yang berlebihan sebagai lambang dari status sosial yang tinggi. Individu yang terlibat dalam perilaku konsumtif cenderung membeli barang-barang mewah atau mengikuti tren terkini bukan hanya untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk menunjukkan status sosial mereka kepada orang lain. Perilaku konsumtif merupakan tindakan dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan individu dalam membeli barang dan jasa untuk kebutuhan konsumsii pribadi.

Menurut (Islami et al., 2023) terdapat beberapa indikator perilaku konsumtif adalah sebagai berikut:

1. Mengutamakan keinginan daripada kebutuhan;
2. Memprioritaskan harga daripada keuntungan;
3. Membeli produk secara berlebihan
4. Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup;
5. Membeli produk karena kemasan yang menarik dan unik; dan
6. Untuk meningkatkan status sosial. Pada dasarnya, individu yang melakukan tindakan konsumtif tidak akan mempertimbangkan prospek jangka panjang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini kuantitatif dengan menggunakan metode kuisisioner. Teknik Pengumpulan data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan kepada para responden. Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket tertutup, dimana pertanyaan telah memiliki alternatif jawaban yang tinggal dipilih oleh responden. Skala yang digunakan dalam angket ini adalah Skala Linkert. Data Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data dilakukan melalui kuesioner yang dibagikan menggunakan google form ataupun wawancara langsung dengan responden. Pertanyaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2009). Penyebaran pertanyaan yang diberikan kepada responden secara sistematis dengan tujuan mendapatkan data dan informasi mengenai Literasi keuangan dan Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga. Sumber informasi dan referensinya diperoleh melalui jurnal dan beberapa menggunakan akses data lewat internet maupun informasi-informasi lain yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mendukung penelitian ini setelah itu di rangkai menggunakan bahasa penulis. Objek penelitian adalah ibu rumah tangga di Desa Dukuh Madurejo yang selama 6 bulan terakhir melakukan belanja online di Platfoem Shopee. Dimana dalam penelitian ini khusus untuk objek yang menggunakan metode pembayaran shopee paylater terdapat 100 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dapat diketahui variasi usia responden yang tersaji dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia Usia (Tahun)

Usia (Tahun)	Frekuensi	Presentase
21-30	40	40%
31-40	41	41%
>40	19	19%
Total	100	100%

Sumber: Data yang di Olah

Dari Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini adalah paling banyak berada pada usia 31-40 tahun dengan jumlah 41 orang atau 41%, dilanjutkan pada usia 21-30 tahun dengan jumlah 40 orang atau 40% dan usia lebih dari 40 tahun sebanyak 19 orang atau 19%. Hal ini menunjukkan jika rata-rata dari segi usia sebagian besar ibu rumah tangga yang diteliti pengguna fitur Shopee PayLater pada aplikasi Shopee adalah ibu-ibu yang memiliki usia 21-40 tahun. Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan Per Bulan Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dapat diketahui variasi pendapatan yang tersaji dalam Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Klasifikasi Responden Berdasarkan Uang Belanja Keluarga Bulanan

Pendapatan	Frekuensi	Presentase
<1.000.000	1	1%
1.000.000-2.000.000	15	15%
2.000.000 – 3.000.000	21	21%
3.000.000-4.000.000	38	38%
>4.000.000	25	25%
Total	100	100%

Sumber : Data yang di Olah

Uji Normalitas

Dari hasil perhitungan uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian asumsi atau persyaratan normalitas dalam model regresi sudah terpenuhi.

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.32668833
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.056
	Positive	.049
	Negative	-.056
Test Statistic		.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

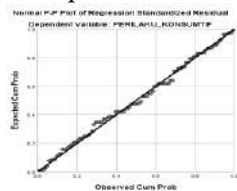
- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data yang di olah

Uji Multikolinieritas di lihat dari Nilai Tolerance < 0.10 dan nilai VIF < 10.00. Maka dapat disimpulkan bahwa analisis regresi pada penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinieritas.

Uji Heretoskedastisitas

Gambar 1. Scatterplot



Sumber: Data yang di olah
 Hasil dari gambar 1 Scatterplot diatas menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena titik-titik data menyebar diatas dan dibawah 0 (nol) pada sumbu Y dan X serta tidak membentuk pola tertentu seperti zig-zag.

Uji Autokorelasi

Nilai Durbin-Watson sebesar 1,903. Dengan jumlah sampel 100 dan variabel bebas 2, maka dapat diketahui nilai dL=1,6131 dan

dU=1,7364. Maka dapat dihitung nilai (4-dU) =2,264, sehingga pengambilan keputusan uji Durbin-Watson adalah $dU < d < 4-dU$ yaitu $1,736 < 1,903 < 2,264$ untuk itu dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4. Regresi Table

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10.955	2.113		5.185	.000
	LITERASI_KEUANGAN	.249	.099	.249	2.521	.013
	PENGUNIAAN_SHOPEE_PAYLATER	.319	.108	.287	3.006	.003

a. Dependent Variable: PERILAKU_KONSUMTIF

Sumber: Data yang di olah

Model regresi linear berganda dapat digunakan untuk memahami bagaimana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berikut model regresi linear berganda (Ghozali 2018).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Berdasarkan hasil dari tabel di atas $Y = 10,955 + 0,249 X_1 + 0,319 X_2 + 2,113 e$
 Nilai konstanta sebesar 10,955 berarti bahwa, apabila Literasi Keuangan (X1) dan Shopee Pay Lateral (X2) diasumsikan tidak ada, maka Perilaku Konsumtif (Y) memiliki nilai sebesar 10,955. Nilai koefisien regresi Literasi Keuangan (X1) sebesar 0,249 bernilai positif, yang berarti kenaikan Literasi Keuangan (X1) akan mengakibatkan kenaikan pada Perilaku Konsumtif (Y) sebesar 0,249. Nilai koefisien Shopee Pay Lateral (X2) sebesar 0,319 bernilai positif, yang berarti kenaikan Shopee Pay Lateral (X2) akan mengakibatkan kenaikan pada Perilaku Konsumtif (Y) sebesar 0,319.

Hasil Uji t

Variabel Literasi Keuangan (X1) terhadap Perilaku Konsumtif (Y)
 Nilai signifikan ($0,013 < 0,05$)
 $T_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,521 > 1,98498$)
 Bedasarkan hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,013 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu $2,521 >$

1,98498. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif secara signifikan

Variabel Shopee Pay Later (X2) terhadap Perilaku Konsumtif (Y)

Nilai signifikan ($0,003 < 0,05$)

T hitung $>$ t tabel ($3,006 > 1,98498$)

Berdasarkan tabel 2 yaitu hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,003 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 dan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel yaitu $3,006 > 1,98498$. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang artinya terdapat pengaruh shopee paylater terhadap perilaku konsumtif secara signifikan.

Sumber: Hasil Olah Data

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) adalah ukuran seberapa besar model regresi dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi memiliki nilai antara 0 dan 1 dengan rentang ($0 < R^2 < 1$) (Ghozali 2018).

Tabel 5. Model Summary

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.492 ^a	.242	.226	1.860

Sumber: Hasil Olah Data

Dari data diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,242 (24,2%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X dalam menjelaskan pengaruh terhadap variabel Y hanya sebesar 24,2% sisanya sebesar 75,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Literasi keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga.

Dalam analisis yang dilakukan, diperoleh hasil uji t sebesar 2.497 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu ($2.497 > 1,98498$) dengan signifikansinya 0,013 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menandakan adanya pengaruh

positif dan signifikan antara literasi keuangan terhadap Perilaku Konsumtif pada ibu rumah tangga. Mereka mengikuti tren dengan membeli produk terbaru tanpa mempertimbangkan kebutuhan sebenarnya.

Waktu yang dihabiskan untuk menjelajahi produk dan ketertarikan pada barang baru, mendorong mereka untuk membeli barang yang tidak diperlukan, sehingga berdampak negatif pada keuangan mereka. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila ibu rumah tangga memiliki literasi keuangan yang baik, maka perilaku konsumtif mereka akan baik pula, begitupun sebaliknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rohmah et al., 2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif.

Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga

Berdasarkan hasil pada uji T diketahui bahwa Penggunaan Shopee Paylater (X2) berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga (Y) dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Dalam analisis yang dilakukan, diperoleh hasil uji t sebesar 3,006 yang menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dari t tabel. Artinya Penggunaan Shopee Paylater memiliki hubungan searah. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa apabila ibu rumah tangga menggunakan Shopee Paylater dengan baik dan benar, maka Perilaku Konsumtif mereka terlaksana dengan baik pula. Begitupun sebaliknya, apabila seorang ibu rumah tangga tidak bijak dalam menggunakan Shopee Paylater, berarti perilaku konsumtif mereka juga tidak benar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Goso & Halim, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Perilaku konsumtif ibu rumah tangga bersikap negatif. Transaksi konsumtif yang dilakukan karena adanya pembelian tanpa pertimbangan, kemudahan yang diberikan dan manfaat yang mereka rasakan. Semakin mudah dan banyaknya manfaat yang mereka rasakan

maka akan semakin sering mereka melakukan transaksi, hal ini memicumunculnya sikap boros.

1. Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga.
2. Penggunaan Shopee Paylater berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Konsumtif Ibu Rumah Tangga

DAFTAR PUSTAKA

- (OJK), O. J. K. (2025). Indeks Literasi Keuangan Meningkatkan, Platform Digital Sasar Edukasi Berkelanjutan. *OJK & BPS*.
- Aftika, S., & Yulistia, D. H. (n.d.). *Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater 'Bayar Nanti' Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis*. *Syariah*.
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/RJMB/article/download/1122%0A8/5081>
- Ahmad, A. (2022). Analisis Faktor Sosial, Psikologi dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Shopping Online di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Perilaku Konsumtif Shopping Online Mahasiswa S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Jakarta Angkatan Tahun 2018 -. *STIE Indonesia*.
- Ayu, S., & Lahmi, A. (2020). Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2), 114.
<https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>
- Dewi, N., Rusdarti, R., & Sunarto, S. (2017). Pengaruh Lingkungan Keluarga, Teman Sebaya, Pengendalian Diri dan Literasi Keuangan Terhadap perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Journal of Economic Education*, 6(1), 29–35.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jec>
- Diskhamarzeweny, D., Irwan, M., & Dewi, D. K. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan, Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 4(1), 35–49.
<https://doi.org/10.36378/khitmah.v4i1.2514>
- Fatmawati, N. (2020). Gaya Hidup Mahasiswa Akibat Adanya Online Shop. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(1), 29–38.
<https://doi.org/10.17509/jpis.v29i1.23722>
- Goso, G., & Halim, M. (2023). Pengaruh Fintech (Paylater), Literasi Keuangan dan Perilaku Komsumtif Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 704–711.
<https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3996>
- Insana, D. R., & Johan, R. S. (2020). Analisis Pengaruh Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. *Journal of Applied Business and Economics (JABE)*, 7(2), 209–224.
- Islami, F., Rafidah, & Lubis, P. A. (2023). Pengaruh Penggunaan E-Money Dan Sistem Pembayaran Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Febi Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Dalam Pespektif Syari'Ah. *INFOTECH Journal*, 9(2), 339–344.
<https://doi.org/10.31949/infotech.v9i2.6072>
- Julita, E., B, I., & Yustati, H. (2022). Pengaruh Penggunaan Shopee Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2953.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6775>
- Leonita, D., & Wulandari, S. (2024). Pengaruh Fitur Shopee Paylater, Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Di Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Program Studi

- Manajemen Angkatan 2020). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(02), 554–566. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i02.33657>
- Maulana, A., Rizki Arjun, N., Akbar, F., Ayu Suryanti, N., & Firmansyah, H. (2021). Peran E- Commerce di Tengah Pandemi terhadap Gaya Hidup Masyarakat Indonesia Masa Kini. *Journal of Education and Technology*, 1(1), 55–61. <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet>.
- Olii, M. R., Pratiknjo, M. H., & Matheosz, J. N. (2020). Online Shop sebagai Alternatif Berbelanja Masyarakat Kota Manado. *Jurnal Holistik*, 13(4), 1–17.
- Profil Internet Indonesia*. (2022). <https://apjii.or.id/survei/surveiprofilinternetindonesia2022-21072047>
- Putri, I. C., Alti, R. M., Asri, Y. N., & Agustianti, R. (2023). Analisis Faktor Sosial, Psikologi, dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Online Shopping di Kalangan Ibu-Ibu. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3, 9775–9790. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3984>
- Putri, M. R. A., & Putri, S. Y. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*, 5(3), 504–512. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i3.5631>
- Putri, N. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online dengan Kontrol Diri sebagai Variabel Moderating. *Skripsi, UIN Mataram*.
- Rohmah, L. N., Maida, N. Z., Kusumaputri, L. A. F., Al-Wafa, M. Q., & Mukti, T. (2024). Pengaruh Kemudahan Bertransaksi dan Sifat Hedonisme Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2023 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 4(1), 13–26. <https://doi.org/10.14710/djieb.23771>
- Siagian, I., Hutasuhut, S., Larasati Sinaga, D., Ulinda Tinambunan, F., Lylia Saragi, S., Sitio, V., & Valentina Banjar, Y. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Nilai Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi 2022. *Journal on Education*, 7(1), 8534–8541. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.7692>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tribuana, L. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Pengendalian Diri Dan Konformitas Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 145–155. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>

CROSS-RELIGIOUS ADOPTION OF ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY AND FINANCIAL LITERACY: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Ismul Aksan

Universitas Khairun

ismulaksan@unkhair.ac.id

Muhsin N Bailusy

Universitas Khairun

muhsin.bailusy@unkhair.ac.id

Filipus Argentano Guntur Suryaputra

Universitas Nusa Cendana

filipus.suryaputra@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi finansial technology (FinTech) Islam dan literasi keuangan, menganalisis 27 publikasi ilmiah dari tahun 2018 hingga 2024. Tinjauan ini menggunakan metodologi yang memanfaatkan basis data seperti Scopus dan alat seperti Publish or Perish (PoP) dan VOSViewer untuk analisis bibliometrik. Temuan ini mengungkapkan pergeseran penting ke arah jurnal ber-impact (Q1 dan Q2), dengan peningkatan volume publikasi yang signifikan pada tahun 2024. Secara geografis, Indonesia, India, dan Malaysia adalah kontributor utama, meskipun banyak penelitian di Indonesia bersifat non-kuartil, yang menunjukkan potensi peningkatan kualitas. Analisis tematik menyoroti dominasi studi adopsi pengguna, dengan teori utama seperti Model Penerimaan Teknologi (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), dan Theory of Planned Behavior (TPB) diterapkan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi FinTech Islam. Terlepas dari kontribusi ini, kesenjangan dalam literatur tetap ada, terutama mengenai perspektif non-Muslim, program literasi keuangan yang disesuaikan, dan integrasi teknologi baru seperti blockchain dan AI. Tinjauan ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk studi di masa depan, menekankan perlunya penelitian longitudinal dan inovasi teknologi untuk memajukan bidang FinTech Islam dan literasi keuangan.

Kata kunci : *Literasi Keuangan, Teknologi Keuangan, Keuangan Islam, Tinjauan Literatur Sistematis, Lintas Agama*

ABSTRACT

This systematic review explores the intersection of Islamic Financial Technology (FinTech) and financial literacy, analyzing 27 scholarly publications from 2018 to 2024. The review employed a rigorous methodology, utilizing databases such as Scopus and tools like Publish or Perish (PoP) and VOSViewer for bibliometric network analysis. The findings reveal a notable shift towards high-impact journals (Q1 and Q2), with a significant increase in publication volume in 2024. Geographically, Indonesia, India, and Malaysia are the major contributors, though many Indonesian studies are non-quartile, indicating potential for quality enhancement. Thematic analysis highlights the predominance of user adoption studies, with key theories like the Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), and Theory of Planned Behavior (TPB) applied to understand the factors influencing Islamic FinTech adoption. Despite these contributions, gaps in the literature persist, particularly regarding non-Muslim perspectives, tailored financial literacy programs, and the integration of emerging technologies like blockchain and AI. This review identifies these research gaps and provides recommendations for future studies, emphasizing the need for longitudinal research and technological innovation to advance the field of Islamic FinTech and financial literacy.

Keywords : *Financial Literacy, Financial Technology, Islamic Finance, Systematic Literature Review, Cross Religious*

INTRODUCTION

Islamic Financial Technology (FinTech) has rapidly emerged as a transformative force within the financial sector, blending the ethical foundations of Islamic finance with advanced technological innovations. Grounded in Shariah principles, Islamic FinTech offers inclusive and ethical financial products that cater to a growing demand for alternatives that align with religious and moral values. These solutions not only cater to Muslim populations but also present an opportunity for broader financial inclusion, extending beyond traditional banking systems to underrepresented demographics. Financial literacy, as a critical enabler, empowers individuals to comprehend, evaluate, and adopt these novel financial technologies, thus bridging the gap between product accessibility and practical usage.

The intersection of Islamic FinTech and financial literacy presents a unique, yet underexplored, research domain, especially in regions where religious and cultural dynamics shape financial behaviors. This systematic literature review seeks to provide a comprehensive synthesis of existing research on Islamic FinTech adoption, with particular emphasis on the role of financial literacy across diverse religious demographics. By examining key themes, identifying gaps in the current literature, and proposing future research directions, this review aims to advance the understanding of how Islamic FinTech can contribute to enhanced financial inclusion and literacy globally.

Numerous studies highlight the significant impact of financial literacy on the adoption of Islamic financial products, yet it remains evident that cultural and religious factors are equally influential. For instance, research by Dewi and Adinugraha (2023) underscores the potential of Islamic FinTech to enhance financial inclusion, particularly for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the halal industry. Additionally, Antara et al. (2016) emphasize the importance of Islamic financial literacy in shaping

individuals' behaviors toward adopting Islamic financing solutions. However, Rahim et al. (2016) suggest that the exploration of Islamic financial literacy is still in its infancy, revealing an urgent need for further investigation into its impact and broader implications.

The adoption of Islamic banking services among non-Muslim populations further illustrates the complex relationship between financial literacy and cultural dynamics. Studies such as those by Supriyanto et al. (2023) suggest that while financial literacy positively influences non-Muslim interest in Islamic banking products, a lack of understanding of Shariah principles can hinder broader acceptance. Despite a high level of interest in Islamic finance, as highlighted there exists a persistent gap between theoretical awareness and actual adoption, indicating the need for more targeted educational initiatives to bridge this divide.

This study aims to identify and analyze the research gaps in the literature on the adoption of Islamic Financial Technology (FinTech) and financial literacy, focusing on their contributions to financial inclusion and the development of financial literacy among diverse populations, including both Muslim and non-Muslim communities. While existing research highlights the impact of financial literacy on the adoption of Islamic financial products, there remains a lack of understanding regarding how cultural and religious factors influence the acceptance and use of technology-based financial solutions. Additionally, although emerging technologies such as blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance (DeFi) hold significant potential to enhance transparency and efficiency in Islamic finance, there is a limited exploration of their application within this context.

The study also identifies a need for longitudinal research to track changes in user behavior over time. The novelty of this research lies in its emphasis on cross-religious perspectives, particularly the adoption of Islamic FinTech by non-Muslim populations, a

largely unexplored area. By addressing these gaps, this study seeks to contribute to the development of more inclusive, sustainable, and technology-driven practices in the Islamic finance sector. The implications of this research extend to both academic and policy-making communities, providing valuable insights for improving financial literacy programs, designing inclusive marketing strategies, and shaping supportive regulatory frameworks for Islamic FinTech.

LITERATURE REVIEW

Theoretical Framework

Based on the provided references, the key theoretical frameworks applied in the study of Islamic Financial Technology (FinTech) and financial literacy: The Technology Acceptance Model (TAM) emphasizes two core factors - perceived usefulness and ease of use - as determinants of technology adoption, providing insights into user acceptance of Islamic FinTech services (Shaikh et al., 2020; Darmansyah et al., 2020; Purwantini et al., 2020). The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) expands on TAM by incorporating additional factors like performance expectancy, social influence, and facilitating conditions, highlighting the broader context of adoption (Darmansyah et al., 2020; Bouteraa et al., 2023).

The Theory of Planned Behavior (TPB) focuses on psychological aspects, suggesting that attitudes, subjective norms, and perceived control influence the intention to adopt Islamic FinTech (Darmansyah et al., 2020; Purwantini et al., 2020). The Diffusion of Innovation (DOI) theory explains how new technologies spread across a population, emphasizing the relative advantage, compatibility with existing values, and observability of innovations (Atikah, 2023; KILIÇ, 2023). In the context of financial literacy, various frameworks assess the knowledge, skills, and attitudes necessary for users to engage with Islamic FinTech effectively (Aziz, 2023; irmansyah et al., 2022). Institutional Theory examines how regulatory frameworks and cultural norms

shape the adoption of Islamic financial technologies (Muryanto, 2022; Supriadi, 2023).

RESEARCH METHOD

The systematic review conducted in this study aimed to comprehensively explore the intersection between Islamic Financial Technology (FinTech) and financial literacy, following established guidelines for systematic reviews. The literature search was carried out using the Scopus database, which is recognized for its comprehensive coverage of peer-reviewed scholarly works. Keywords such as "Islamic Financial Technology," "Islamic FinTech," and "financial literacy" were employed, with Boolean operators used to refine the search of perspectives and formats.

The literature search was conducted using reputable academic databases, primarily Scopus, recognized for its comprehensive coverage of peer-reviewed scholarly works. Keywords such as "Islamic Financial Technology," "Islamic FinTech," and "financial literacy" were employed, with Boolean operators (e.g., AND, OR) used to refine the search. The scope of the search was limited to scholarly outputs published between 2018 and 2024, reflecting the most recent developments and trends in this evolving domain.

The inclusion criteria were meticulously designed to ensure the relevance and quality of the selected studies:

1. **Topical Focus:** Only studies examining Islamic FinTech and financial literacy, either individually or in conjunction, were considered.
2. **Scholarly Merit:** Publications had to provide empirical evidence, theoretical discussions, or conceptual insights directly related to the research themes.
3. **Language and Accessibility:** Studies published in English or other widely recognized academic languages were prioritized.
4. **Publication Type:** Articles, books, book chapters, and conference papers were

Quartile	Document Type					Total
	A	B	B C	C P	R	
Q1	2					2
Q2	6				1	7
Q3	2					2
Q4	2					2
Non-Q						
	4	1	3	6		14
	1					
Total	6	1	3	6	1	27

included to capture a diverse range of perspectives and formats.

To compile an initial pool of literature, the *Publish or Perish* (PoP) application was utilized, facilitating efficient retrieval of publication metrics and relevant citations. Bibliometric visualization software, such as VOSviewer, was employed to map thematic clusters and co-occurrence networks, enabling an understanding of the intellectual structure and research trends in the field. To ensure transparency and replicability, the review process adhered to the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) framework (Kanwal, 2023).

The systematic review followed a multistage screening process to ensure rigor and precision:

1. Identification: An initial pool of studies was retrieved using predefined keywords and filters. Duplicates were removed to ensure a unique dataset.
2. Screening: Titles and abstracts of the retrieved studies were screened to determine their relevance to Islamic FinTech and financial literacy. Irrelevant works were excluded at this stage.
3. Eligibility: Full-text assessments were conducted on potentially relevant studies. Each publication was examined to verify its alignment with the inclusion criteria, ensuring thematic and methodological relevance.
4. Inclusion: A final set publications was selected for in-depth analysis. These studies demonstrated high methodological rigor, thematic relevance, and significant contributions to understanding the interplay

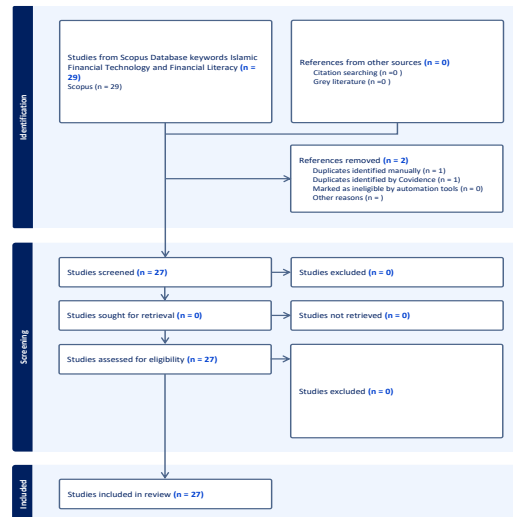
between Islamic FinTech and financial literacy.

Table 1. Result by Quartile and Document Type

RESULTS

Based on the literature search in scopus database with Keywords such as "Islamic Financial Technology," "Islamic FinTech," and "financial literacy" from 2018 until 2024 conducted using the Publish or Perish (PoP) tool and the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) methodology, a total of 27 studies were identified and included for further analysis.

Figure 1. PRISMA Method



The analysis results are based on the classification of journal quartiles/ranks (Scopus Q1-Q4), document types (article, book, book chapter, conference paper, and review), publication years, countries, variables and theories used, as well as bibliometric network analysis utilizing VOSViewer.

Table 2. Result by Country and Quartile

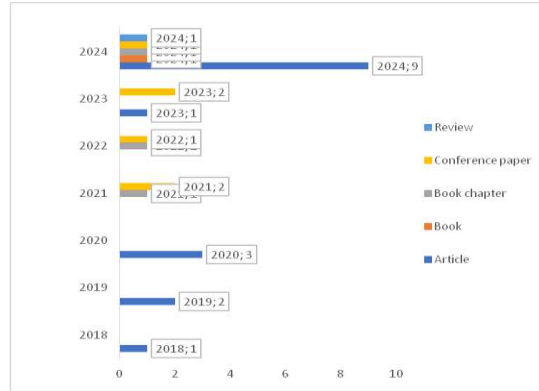
Country	Quartile					Total
	Q1	Q2	Q3	Q4	NQ	
India		1	1			2
Indonesia	1	3	1	2	10	17
Indonesia & Malaysia		1				1
Malaysia	1	1				2
Morocco					1	1
Muslim-majority countries					1	1
Pakistan					1	1
No-Country		1			1	2
Total	2	7	2	2	14	27

The table provides a detailed breakdown of the documents analyzed in this systematic review, categorized by document type and journal quartile (Q1–Q4). The key findings are summarized as follows: A total of 27 documents were included in the analysis.

Articles constitute the majority (16 documents, 59%), followed by conference papers (6 documents, 22%), book chapters (3 documents, 11%), while books (4%) and reviews each contribute 1 document (4%). The dominance of articles and conference papers reflects the prevalence of scholarly work on the subject within peer-reviewed journals and academic conferences.

Distribution by Journal Quartile: Among the 16 articles, the majority were published in Q1 journals (2 articles, 13%), indicating a strong reliance on high-impact and reputable sources. Q2 journals accounted for 6 articles (38%), while Q3 and Q4 journals each contributed 2 articles (13%) and Non-Q 4 articles (25%). The high concentration of articles in Q1 and Q2 journals (50%) underscores the quality and reliability of the literature included. The systematic review is grounded in literature derived predominantly from high-quality sources, ensuring the credibility and robustness of the findings. The diversity of document types—articles, books, book chapters, conference papers, and reviews—demonstrates a comprehensive approach to synthesizing various perspectives on Islamic Financial Technology and financial literacy.

Figure 1. Result by Years and Document Type



The table above presents the results of scientific publications over the period of 2018-2024. Based on the data presented, it can be observed that there is a significant increase in the number of scientific publications in 2024.

From 2018 to 2020, the number of scientific publications remained relatively stable, with an average of 2-3 publications per year. However, in 2021 and 2022, there was an increase in the number of scientific publications, particularly in the form of articles and conference papers.

In 2023, there was an increase in the number of scientific publications, particularly in the form of articles and conference papers. However, in 2024, there was a very significant increase in the number of scientific publications, with a total of 13 publications, including 9 articles, 1 book, 1 book chapter, 1 conference paper, and 1 review.

Overall, the total number of scientific publications over the period of 2018-2024 is 27, with a breakdown of 16 articles, 1 book, 3 book chapters, 6 conference papers, and 1 review. These results indicate a significant increase in research productivity and scientific publication in 2024.

The table above presents the distribution of publications by country, categorized into quartiles (Q1-Q4) and non-quartile (Non-Q) publications. The data reveals interesting insights into the geographical distribution of publications.

Firstly, it is notable that the majority of publications (17) are from Indonesia, with a significant proportion (10) falling into the non-quartile category. This suggests that Indonesian researchers are actively publishing

in various journals, but may need to focus on improving the quality and impact of their research to increase their presence in top-tier journals.

In contrast, India and Malaysia have a relatively small number of publications (2 each), with a majority of them falling into the Q1 and Q2 categories. This indicates that researchers from these countries are producing high-quality research, but may need to increase their publication output to have a greater impact.

Interestingly, there is a single publication from Morocco and Pakistan, both of which fall into the non-quartile category. This suggests that researchers from these countries may face challenges in publishing their research in reputable journals, and may require additional support and resources to improve their publication output.

The category Muslim-majority countries are Indonesia, Nigeria, Pakistan, Iran, Bangladesh Malaysia and Brunei with a single publication falling into the non-quartile category. This suggests that researchers from these countries may face similar challenges in publishing their research, and may benefit from increased collaboration and support.

The No-Country category, which includes publications without a specified country affiliation, accounts for 2 publications. This may indicate that some researchers are publishing their work without affiliating with a specific country or institution. Data suggests that there is a need for increased support and resources for researchers from certain countries, particularly Indonesia, Morocco, and Pakistan, to improve the quality and impact of their research. Additionally, the data highlights the importance of collaboration and networking among researchers from different countries to increase the visibility and impact of their research.

Table 3. Result by Journal and Document Type

Journal	Article	Book	Book	Conference	Review	Total
---------	---------	------	------	------------	--------	-------

Acadademy of Strategy Management Journal	1					1
Advances Intelligent Systems and Computing			1			1
Al-Manahij	1					1
Borsa Istanbul Review	1					1
Edelweiss Applied Science Technology	1					1
FinTech in Islamic Financial Institutions: Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance			1			1
International Conference on Information Systems, ICIS			1			1
International Conference Sustainability Islamic Business Finance, SIBF			2			2
International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management	1					1
International Journal Scientific Technology Research	1					1
Islamic FinTech: Insights and Solutions		1				1
Islamic Microfinance	1					1
Journal Islamic Marketing	2		1			3
Journal of Advanced Research in Applied Sciences and Engineering Technology	1					1
Journal of Infrastructure, Policy and Development	1					1
Journal of Islamic Accounting and Business Research	1					1
Journal of Islamic Monetary Economics and Finance	1					1
Journal of Telecommunications and the Digital Economy	1					1
Jurnal IUS Kajian Hukum Keadilan	1					1
Lecture Notes in Networks and Systems			1			1

Quality - Access to Success	1	1				
Qubahan Academic Journal	1					
Springer Proceedings in Business and Economics		1				
Technopreneurship in Small Business for Sustainability		1				
Total	1	1	3	6	1	2
	6					7

The table above presents the distribution of publications by journal, encompassing articles, books, book chapters, conference papers, and reviews. This analysis provides insight into the diversity of journals utilized by authors to publish their research findings.

Firstly, it is evident that the majority of publications (16) are articles published in various journals. The Journal of Islamic Marketing is the most frequently used journal, with a total of 3 publications, including 2 articles and 1 review. This suggests that this journal is a popular platform for authors to publish their research findings in the field of Islamic marketing.

Furthermore, it is observed that several other journals are also utilized by authors, including the International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Journal of Islamic Accounting and Business Research, and Journal of Islamic Monetary Economics and Finance. This indicates that authors have a range of journal options to publish their research findings in the field of Islamic finance and economics.

In the book category, it is noted that there is 1 book publication published by Springer, titled "FinTech in Islamic Financial Institutions: Scope, Challenges, and Implications in Islamic Finance". This suggests that authors have the opportunity to publish their research findings in a more comprehensive book format. In the conference paper category, it is observed that there are 6 conference paper publications published in various conferences, including the International Conference on Information Systems, ICIS, and the International

Conference on Sustainability in Islamic Business Finance, SIBF. This indicates that authors have the opportunity to publish their research findings in a more concise and rapid conference paper format.

This comprehensive table presents a summary of various studies on Islamic fintech and financial literacy, highlighting the dependent variables, independent variables, moderating/mediating variables, and theoretical frameworks employed. The studies cover a range of topics, including intention to adopt Islamic fintech, Islamic mutual funds investment, Islamic stock investment, financial inclusion, and Islamic social finance literacy (*Appendix 1.*)

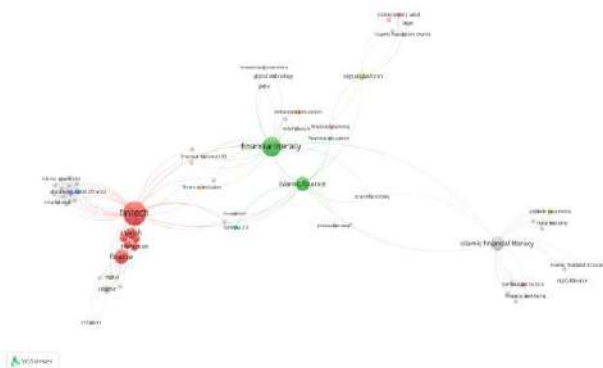
The independent variables identified in these studies include challenges and risk, technical literacy, financial literacy, digital literacy, social acceptance, financial technology, religiosity, and Islamic economic law. The moderating/mediating variables include financial technology, religiosity, and socio-demographic variables.

The theoretical frameworks employed in these studies include the Technology Acceptance Model (TAM), Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), Diffusion of Innovations (DOI) Theory, Theory of Planned Behavior (TPB), Social Cognitive Theory, Islamic Economics, and Institutional Theory.

The findings of these studies provide valuable insights into the factors that influence the adoption and use of Islamic fintech, Financial literacy, Islamic financial products, and digital platforms for Islamic financial education. The studies also highlight the importance of financial literacy, religiosity, and social acceptance in shaping the behavior of individuals and organizations in the Islamic finance sector.

This table provides a comprehensive overview of the current state of research on Islamic finance and fintech, and highlights the need for further studies to explore the complex relationships between technology, finance, and religiosity in the Islamic finance sector.

Figure 2. Bibliometric Network with VOSViewer



The visualized bibliometric network highlights interconnected research themes in financial technology (fintech), Islamic finance, and financial literacy. Three main clusters emerge: fintech (red), Islamic finance and financial literacy (green), and Islamic financial literacy (purple). The fintech cluster emphasizes topics such as *shariah compliance*, *blockchain*, and *financial inclusion*, reflecting the integration of technological innovation with Islamic principles to enhance inclusivity. Meanwhile, the green cluster illustrates the critical role of financial literacy in supporting investment decisions within an Islamic finance framework, with key terms such as *halal lifestyle*, *financial planning*, and *investment intentions*. The purple cluster connects Islamic financial literacy with *financial well-being*, *behavioral factors*, and *digital finance*, underlining its contribution to fostering financial resilience and technological adaptation among individuals.

This visualization underscores the strategic significance of topics like *financial inclusion*, *digital platforms*, and *innovation*, which act as central nodes linking the clusters. It reveals the multidisciplinary nature of this research area, wherein the intersection of fintech, Islamic finance, and financial literacy addresses contemporary societal needs. By advancing the understanding of these interconnected themes, the research provides actionable insights for promoting financial inclusion through Islamic values, leveraging digital innovation, and empowering

communities with financial education tailored to both religious and technological contexts

DISCUSSION

The systematic review highlights significant advancements in research productivity and quality in the field of Islamic FinTech and financial literacy between 2018 and 2024. Out of 27 publications analyzed, journal articles accounted for the majority (59%), followed by conference papers (22%) and book chapters (11%). This dominance of journal articles reflects the academic preference for rigorous, peer-reviewed work. Notably, 50% of these journal articles were published in Q1 and Q2 journals, underscoring a reliance on high-impact sources to propel this research field forward. The sharp increase in publications, especially in 2024, with 13 new contributions including 9 journal articles signals growing global interest and a shift toward addressing emerging trends in Islamic financial technology and literacy.

From a geographical perspective, Indonesia stands out as the leading contributor with 17 publications. However, many of these publications are non-quartile, highlighting the need for improving research quality to achieve greater impact. Conversely, India and Malaysia focus on publishing in Q1 and Q2 journals, showcasing a deliberate emphasis on quality over quantity. The dominant research themes include Islamic FinTech adoption, financial literacy, and social acceptance, often framed through established theoretical models like TAM, UTAUT, and TPB. Bibliometric analysis further reveals the interdisciplinary nature of the field, emphasizing key areas such as financial inclusion, digital platforms, and technological innovation. These findings point to the importance of fostering collaboration and enhancing methodological rigor to address the intricate interplay between finance, technology, and religiosity.

Despite these advancements, several critical gaps in the literature remain. First, most research centers exclusively on Muslim populations, neglecting cross-religious

perspectives. This limits understanding of how non-Muslims perceive and engage with Islamic FinTech, even though its principles such as transparency and fairness have universal appeal. Second, there is a dearth of studies on financial literacy programs tailored to Islamic finance principles. Empirical investigations into the development, implementation, and effectiveness of such initiatives are essential to encourage informed adoption and foster financial empowerment among diverse demographic groups.

The field would benefit from longitudinal studies and a deeper focus on technological innovation. Current cross-sectional approaches are insufficient to capture changes in user behavior over time, leaving critical adoption dynamics unexplored. Moreover, emerging technologies such as blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance (DeFi) remain under-researched within the context of Islamic FinTech. Exploring how these technologies can be integrated to enhance transparency, efficiency, and compliance could drive transformative advancements and align modern innovations with Islamic financial principles. Addressing these gaps is crucial for enriching the field and supporting its comprehensive development.

CONCLUSION

The findings of this systematic review underscore the growing academic interest and practical significance of Islamic FinTech and financial literacy, while highlighting critical gaps that demand attention from practitioners, policymakers, and researchers. Educational initiatives should integrate Islamic finance principles with digital finance skills to foster financial literacy across diverse demographic groups, including non-Muslim audiences. Such programs would not only promote inclusivity but also empower users to make informed financial decisions in the evolving digital economy.

Furthermore, Islamic FinTech providers should develop inclusive marketing strategies that emphasize universal values such as transparency, ethical investments, and

economic benefits. By appealing to shared principles, these strategies can broaden the appeal of Islamic FinTech solutions and enhance their social acceptance across religious boundaries. From a policy perspective, regulatory frameworks must evolve to support the growth of Islamic FinTech while maintaining compliance and building trust among users. Policymakers should ensure that these frameworks are inclusive and facilitate innovation without alienating non-Muslim participants in the financial ecosystem.

For future research, there is a pressing need to examine Cross-Religious or non-Muslim adoption of Islamic FinTech and Financial Literacy, offering insights into inclusive strategies that address diverse user needs. Behavioral studies leveraging models such as TAM and UTAUT can provide deeper understanding of adoption dynamics, while investigations into emerging technologies like artificial intelligence and blockchain could reveal their potential to enhance trust, efficiency, and usability in Islamic FinTech. Addressing these practical and research directions will contribute to a more equitable and innovative financial landscape that aligns with the principles of Islamic finance

LIMITATION

While this study sheds light on critical adoption factors, it is limited by its cross-sectional design, which captures intentions at a single point in time. Future research could adopt longitudinal approaches to examine changes in adoption behavior over time. Additionally, exploring regional variations and cultural influences within could provide deeper insights into localized adoption trends. Investigating how advancements in FinTech, such as artificial intelligence and blockchain, impact Islamic finance adoption would further enrich the literature on this evolving topic.

DAFTAR PUSTAKA

Ajouz, M. (2023). Unveiling the potential of the islamic fintech ecosystem in

- emerging markets. *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*, 3(1), 115-148. <https://doi.org/10.52747/aqujie.3.1.219>
- Atikah, N. (2023). Islamic economic transformation in the digital era: a review of the role of fintech. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(12), 1219-1225. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i12.4654>
- Aziz, A. (2023). The role of digital literacy and financial literacy on the use of islamic fintech moderated by religiosity the impact on personal financial management. *IJSAS*, 1(6), 759-776. <https://doi.org/10.59890/ijsas.v1i6.1019>
- Bouteraa, M., Chekima, B., Lajuni, N., & Anwar, A. (2023). Understanding consumers' barriers to using fintech services in the united arab emirates: mixed-methods research approach. *Sustainability*, 15(4), 2931. <https://doi.org/10.3390/su15042931>
- Dewi, I. and Adinugraha, H. (2023). The role of sharia fintech in improving halal financial inclusion in msme in indonesia. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 18-29. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18693>
- Fianto, B., Hendratmi, A., & Aziz, P. (2020). Factors determining behavioral intentions to use islamic financial technology. *Journal of Islamic Marketing*, 12(4), 794-812. <https://doi.org/10.1108/jima-12-2019-0252>
- Firmansyah, E., Masri, M., Anshari, M., & Besar, M. (2022). Factors affecting fintech adoption: a systematic literature review. *Fintech*, 2(1), 21-33. <https://doi.org/10.3390/fintech201002>
- Hasan, R., Hassan, M., & Aliyu, S. (2020). Fintech and islamic finance: literature review and research agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (Ijief)*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hudaefi, F., Hassan, M., & Abduh, M. (2023). Exploring the development of islamic fintech ecosystem in indonesia: a text analytics. *Qualitative Research in Financial Markets*, 15(3), 514-533. <https://doi.org/10.1108/qrfm-04-2022-0058>
- Ismamudi, I. (2023). Islamic fintech and financial inclusion: innovations for sustainable economic empowerment. *DEAL*, 1(01), 54-60. <https://doi.org/10.37366/deal.v1i01.3303>
- Ismamudi, I. (2023). Islamic fintech and financial inclusion: innovations for sustainable economic empowerment. *DEAL*, 1(01), 54-60. <https://doi.org/10.37366/deal.v1i01.3303>
- Kanwal, A. (2023). Exploring the nexus of financial technologies, financial inclusion, and blockchain in islamic finance within digital transformation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(4). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1104.0675>
- Khan, M. (2023). Facilitating condition of acceptance and use of islamic financial technology (islamic fintech): technological forecasting in saudi banks. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 11(3), 3215-3231. <https://doi.org/10.52131/pjhss.2023.1103.0606>
- KILIÇ, G. (2023). The emergence of islamic fintech and its applications. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. <https://doi.org/10.54427/ijisef.1328087>
- Mansyur, A. and Ali, E. (2022). The adoption of sharia fintech among millennial in indonesia: moderating effect of islamic financial literacy on utaut 2. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i4/13035>

- Marla, P., Musnadi, S., & Shabri, M. (2023). The role of financial technology in mediating the influence of islamic financial literacy on islamic financial inclusion in banda aceh city. *International Journal of Scientific and Management Research*, 06(07), 231-238. <https://doi.org/10.37502/ijsmr.2023.6714>
- Muryanto, Y. (2022). The urgency of sharia compliance regulations for islamic fintechs: a comparative study of indonesia, malaysia and the united kingdom. *Journal of Financial Crime*, 30(5), 1264-1278. <https://doi.org/10.1108/jfc-05-2022-0099>
- Purwantini, A., Athief, F., & Waharini, F. (2020). Indonesian consumers' intention of adopting islamic financial technology services. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 5(2), 171. <https://doi.org/10.22515/shirkah.v5i2.304>
- Putri, V. (2021). Islamic fintech and indonesian msme during the pandemic. *Sebelas Maret Business Review*, 6(2), 111. <https://doi.org/10.20961/smbr.v6i2.56063>
- Ramadhan, D. (2022). Financial technology and sharia compliance regulations in islamic banking in indonesia. *Al-Arbah Journal of Islamic Finance and Banking*, 4(2), 217-231. <https://doi.org/10.21580/al-arbah.2022.4.2.15647>
- Shaikh, I., Qureshi, M., Noordin, K., Shaikh, J., Khan, A., & Shahbaz, M. (2020). Acceptance of islamic financial technology (fintech) banking services by malaysian users: an extension of technology acceptance model. *Foresight*, 22(3), 367-383. <https://doi.org/10.1108/fs-12-2019-0105>
- Supriadi, I. (2023). Accelerating islamic economy and finance through financial technology: challenges and potential in the digital age. *International Journal of Islamic Economics*, 5(02), 153. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740>
- Supriadi, I. (2023). Accelerating islamic economy and finance through financial technology: challenges and potential in the digital age. *International Journal of Islamic Economics*, 5(02), 153. <https://doi.org/10.32332/ijie.v5i02.7740>
- Suseno, I., Yohanna, L., & Sondari, E. (2021). Islamic financial literacy and management for msme. *Proceeding of the International Conference on Family Business and Entrepreneurship*, 2(1). <https://doi.org/10.33021/icfbe.v2i1.3540>

**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD POLICIES IN THE VALUE OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN PUBLIC SECTOR FINANCIAL MANAGEMENT
(Case Study of Serdang Village, Tanjung Bintang District)**

Apip Alansori *, Balqis Anggraini, Nayla Qhoirunazli Sasmita, Suci Ameria

Malahayati University

apip@malahayati.ac.id*, balqisanggraini12@gmail.com, naylaqsasmita475@gmail.com, suciamiria@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sektor publik di Desa Serdang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, mengumpulkan data melalui wawancara dengan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Serdang telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yang mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan keuangan secara terstruktur. Transparansi dilakukan dengan menampilkan banner anggaran di kantor desa dan menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui alokasi dan realisasi anggaran. Akuntabilitas terlihat dari penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka dalam forum desa, sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan turut memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Meski demikian, terdapat kritik dari warga terkait kualitas pembangunan infrastruktur, yang mengindikasikan perlunya peningkatan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SAP berkontribusi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menunjang kesejahteraan melalui alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Sektor Publik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the implementation of Government Accounting Standards (SAP) as stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010 on transparency and accountability in public sector financial management in Serdang Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency. Using a qualitative method with a descriptive analysis approach, data was collected through interviews with village officials. The results of the study show that Serdang Village has implemented Government Accounting Standards (SAP) through the use of the Village Financial System (Siskeudes), which facilitates the process of planning, implementing, administering, and reporting financial in a structured manner. Transparency is carried out by displaying budget banners at village offices and holding village deliberations involving the community, so that the community can find out the budget allocation and realization. Accountability can be seen from the submission of financial accountability reports openly in village forums, in line with Permendagri Number 20 of 2018. Community involvement in the planning and supervision process also strengthens good governance. However, there is criticism from residents regarding the quality of infrastructure development, which indicates the need to improve communication between the village government and the community. These findings show that SAP implementation contributes to increasing transparency, accountability, and community participation, which can ultimately support welfare through more targeted budget allocation.

Keywords: Government Accounting Standards, Transparency, Accountability, Public Sector Financial Management.

INTRODUCTION

In 2010, the Indonesian government introduced a new policy regarding public sector accounting standards through Government Regulation (PP) Number 71 of 2010. This policy stipulates that the preparation and reporting of financial institutions must use an accrual basis, replacing the previous rules stipulated in Government Regulation Number 24 of 2005.

Government Accounting Standards (SAP) are a collection of accounting principles and guidelines applied by government agencies in compiling and presenting financial statements. Because it has a strong legal basis, SAP plays an important role in efforts to improve the quality of government financial reporting (Sutrisno & Astuti, 2024). Therefore, the central and regional governments are obliged to make and submit financial statements in accordance with qualitative characteristics as a form of responsibility for the management of public funds. Every year, the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) conducts an audit of the Regional Government Financial Statements (LKPD) to evaluate the reliability and quality of the information presented (Jauhari et al., 2021).

The preparation of SAP is carried out by the Government Accounting Standards Committee which is independent, and its determination is carried out through Government Regulations after obtaining input from the Financial Audit Board. SAP itself is an accounting principle used in the preparation and presentation of financial statements of government agencies.

It is hoped that the implementation of this standard can improve the quality of financial reporting throughout the government environment. Thus, government financial information can be a reliable reference in decision-making, while supporting the creation of transparency and accountability.

Accountability, which also means accountability, is a moral and administrative responsibility that must be fulfilled by leaders, officials, or implementers of an activity. They have the responsibility to ensure that every obligation and role they carry out is carried out

appropriately and in line with the provisions of the applicable law. In regional financial management, especially at the village level, accountability aims to evaluate the extent to which the implementers of activities utilize public funds efficiently, effectively, and transparently. As the highest leader at the village level, the village head bears full responsibility to report and provide evidence of accountability to the community for the implementation of various programs financed from the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This action is a form of transparency and social supervision, so that the community can supervise and evaluate the use of public funds for the common good (Rusrina, n.d.).

In addition to upholding the principle of accountability, the village government also needs to prioritize transparency so that the community can more easily access the information they need. This transparency includes the delivery of clear and open information about the implementation of the program, the policies taken, the budget management process, and the achievements or results of the activities that have been carried out. Thus, the community can obtain the information that is their right, and participate in supervising and assessing the performance of the village government objectively (Sari & Widyawati, 2021). Financial transparency of public institutions is essential: First, it aims to build and strengthen public trust; Second, to increase community participation in supervision; Third, because every citizen has the right to obtain information and the right to know everything related to the public interest (Salle, 2017). Public sector financial management, especially at the village level, is an important pillar in realizing good governance (*good governance*).

Based on the applicable legal provisions, the management of village funds is the full responsibility of the village government and covers all stages, starting from the planning process, implementation, management, to reporting and accountability to the community. This provision was first regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 20 of 2018 concerning

Village Financial Management, which also includes the use of village-specific financial management applications. The application is the Village Financial System (Siskeudes), which was developed through collaboration between the Ministry of Home Affairs and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). Village budget management must comply with these regulations, and be implemented based on the principles of accountability, transparency, participation, and control, in order to ensure open and accountable village financial governance (Saputri & Farida, 2025).

Several studies discuss the application of SAP Number 01 in financial reporting, including research conducted by Nur Mujianto (2022) in Toto Makmur Village. The study shows that the Toto Makmur Village government only prepares one main type of financial statement, namely the Budget Realization Report, so it has not met the provisions stated in the Government Accounting Standard Statement (PSAP) Number 01 regarding the presentation of financial statements. Another study with a similar topic was conducted by Bagus Prayogi (2022) in Karang Anyar Village, Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency. The results show that the village financial accountability report in the region has also not implemented SAP No. 01 comprehensively, because the form of the financial report prepared is only in the form of a Budget Realization Report which is reported every semester to the government level above it.

Meanwhile, in another study conducted by Sri Wahyuni Nur (2021) in Tellumpanuae Village, Maros Regency, it is often encountered that problems from the transparency aspect are still not carried out properly, where there is no information on the notice board or information board regarding the amount of expenditure and income in carrying out Village Fund Allocation activities. This situation occurs because the village government is not responsive in implementing openness at the planning, implementation, and preparation stages of the village budget. The principle of transparency emphasizes that all citizens have the right and equal opportunity to access information related

to the budgeting process, because it directly concerns the aspirations and needs of the community. However, the application of this principle still faces a number of obstacles, one of which is the low level of community involvement, as conveyed by community leaders. This lack of participation is due to the strong dominance of village heads and low public interest in supporting programs funded from village fund allocations. As a result, some of the programs that have been designed cannot be implemented according to the original plan. Therefore, understanding the level of community participation and the application of transparency in the accountability of village budget management is important, because both play an important role in encouraging the achievement of overall community welfare (Aprilya, 2020).

It is hoped that the research conducted by the researcher on the implementation of Financial Accounting Standards in Serdang Village can show that the village apparatus has applied the concepts of transparency, accountability, and community participation to realize good governance, taking into account existing factors and realities.

LITERATURE REVIEW

Agency Theory

Agency Theory is an approach in the field of economics and management that describes the contractual relationship between two parties, namely the party who gives the authority or mandate (principal) and the party who receives the mandate to act on behalf of the principal's interests (agent). This relationship generally forms in an organization that has a hierarchical structure, where the principal occupies a position of authority higher than the agent.

Within the framework of this theory, the principal gives the agent the authority to carry out certain actions aimed at fulfilling the interests or goals of the principal himself. Agency theory plays an important role in explaining how differences in interests between principals and agents can create *agency problems*, which are challenges in achieving

effective management and decision-making. Thus, a supervisory or control mechanism, such as the formulation of a contract that contains a system of incentives and accountability, is needed to ensure that the agent acts in accordance with the principal's interests. Agency theory has an important role in describing how the difference in interests between principals and agents can give rise to agency *problems*, which are obstacles to realizing effective management and decision-making. Therefore, the implementation of a control system through contracts that regulates the rights, obligations, and rewards for agents is necessary so that the interests of the principal are protected.

Halim and Abdullah (2010), citing Johnson (1994), stated that the interaction between the executive or bureaucracy and the legislature or parliament is known as the self-interest model. In this model, each actor has its own interests: legislators seek support for re-election, bureaucrats seek to increase their institution's budgets, and the public wants to reap as much benefits as possible. To maintain public support, legislatures tend to approve programs and projects that can improve their image in the eyes of voters. On the other hand, bureaucrats propose new programs to expand the role of their institutions, while the public feels that they benefit from government policies without having to bear the entire cost of implementation.

Legitimacy Theory

Legitimacy Theory is used to explain how organizations respond to environmental and social issues (Rankin et al., 2012). In this context, the concept of the social contract describes how an organization builds harmonious relationships with society. The community hopes that the actions of an organization are in line with applicable social and environmental values. Therefore, in order to maintain the continuity of its operations in the future, organizations are required to meet these expectations. Because the social contract is unwritten, organizations must proactively adjust their behavior to conform to societal

norms and expectations (Novitasari & Iswara, 2024).

Legitimacy Theory has a strategic role in the sustainability of the organization, because support and recognition from the community are important factors in the future development of the organization. According to O'Donovan (2000), organizational legitimacy is a form of acceptance given by the public to the company, and is something that the company always strives to obtain. Thus, legitimacy plays an important foundation that supports the company's long-term survival.

In this context, the theory of legitimacy emphasizes the importance of the optimal implementation of corporate social responsibility. Disclosure of social activities that are carried out openly and responsibly can improve the company's image and reputation in the eyes of the public. A positive response from the community to the company's activities will create socially and economically beneficial value, including in terms of increasing profits. In addition, the positive image that the company has can be an attraction for investors to invest their capital.

Deegan et al. (2002) state that legitimacy can be obtained if the company's activities are aligned with the social values embraced by the community and do not conflict with the prevailing environmental system. According to Lindblom (1994), the implementation of corporate social responsibility (CSR) can be used as a means by management to show concern for social values and reduce the potential adverse impact that may be caused by corporate activities on society.

Government Accounting Standards

Based on Article 1 Paragraph (3) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010, Government Accounting Standards (SAP) are defined as a collection of accounting principles used in the preparation and presentation of financial statements by government entities. Therefore, SAP functions as a normative guideline that has a strong legal basis to support the improvement of the quality of government financial reporting in Indonesia.

Furthermore, in Article 1 Paragraph (8) it is explained that accrual-based SAP is a standard that recognizes all financial elements such as revenue, expenses, assets, liabilities, and equity in accrual-based financial statements. In addition, elements such as revenue, expenditure, and financing are also recognized in the budget implementation report on the basis of recognition in accordance with the provisions in the State Budget or APBD.

The use of accrual-based SAP covers all government entities, both at the central and regional levels, including government organizational units that are required to prepare financial statements in accordance with laws and regulations. The rules regarding accrual-based SAP are outlined in the Government Accounting Standard Statement (PSAP) and are supported by the Government Accounting Conceptual Framework. Both documents are officially listed in Attachment I of Government Regulation Number 71 of 2010 (BPK, 2010).

Transparency

In English, the word *transparency* means an important principle that is the basis for accountable financial management. According to Badiul (2020:4), transparency needs to be applied comprehensively at every stage of village financial management, starting from the planning stage, budget preparation, program implementation, administration, reporting, to accountability. Transparency is a principle that ensures that everyone has the right and freedom to access information related to the activities of an organization or individual, including financial information, programs run, benefit sharing, and other matters.

In addition, transparency can also be interpreted as a form of openness that reflects the government's steps in providing widespread access to information to the public. With this openness, the government can build and strengthen public trust, because the public is believed to have the right to obtain accurate and adequate information (Novitasari & Iswara, 2024).

Furthermore, transparency also describes the implementation of open government functions, where activities such as planning,

implementation, supervision, and control can be accessed by interested parties. This concept reflects the organization's commitment to be open in managing public resources to the community or institutions that have the responsibility of overseeing state finances. (Karimayuni, 2020).

Transparency will reduce the level of uncertainty in the decision-making process regarding the management of village funds, because the dissemination of various information that has so far only been accessed by the government can provide opportunities for the community to participate in decision-making, for example with village meetings that are conducted in deliberation. In addition, transparency can narrow the opportunities for corruption within the scope of the village government with the community participating in the decision-making.

Accountability

According to Peters (2010:165), accountability has a different meaning than responsibility. Accountability focuses more on the relationship between the organization as an entity and external parties, so the analysis is at the macroorganizational level. The main focus is on the sociological dimension of the organization, namely how the organization interacts and builds relationships with interested outside parties. Meanwhile, the aspect of responsibility is emphasized on the individual, where every member in a public organization is obliged to act ethically, carry out duties correctly, and obey the applicable guidelines and follow the applicable training.

Bryner in Peters (2010:265) emphasized that members of public sector organizations are obliged to comply with the provisions of the law, both general laws that govern the administration of policies and special laws that govern certain programs that are being implemented. This explanation becomes even clearer when the concepts of accountability, responsibility, and responsiveness are understood simultaneously as part of the government's transparency efforts to the public, as expressed by Gortner, Nichols, and Ball (2007:195).

According to LAN and BPKP (2000), the principles of accountability in government include the commitment of leaders and apparatus in carrying out their duties responsibly, compliance with regulations, the ability to evaluate the achievement of goals, orientation to results and benefits, and the application of the values of honesty, objectivity, transparency, and innovation reflected in performance reporting. Therefore, as an institution that functions to serve the public, the government is obliged to account for all its actions to the public, both directly and indirectly (Novitasari & Iswara, 2024).

Public Sector Financial Management

Public sector accounting is part of the accounting discipline that focuses on financial management and accountability in the government or public sector environment. The main objective is to ensure that the use of public resources is carried out efficiently, transparently, and accountably.

Public sector finance encompasses various parts of the financial management and operations of various government entities and agencies. Some of the key areas within this scope include (Ball et al., 2002; Malyshko, 2021): Budget, Revenue Collection, Public Debt Management, Public-Private Partnerships (PPPs), Financial Regulation and Supervision, Public Sector Reporting and Accountability, Fiscal Policy, Public Sector Innovation, International Cooperation and Development Assistance, Public Financial Management Reform.

Village Government

The term government refers to state institutions or organs that are tasked with carrying out government functions, while the government emphasizes more on the process of implementing these functions. The government as an organ of the state can be distinguished into two meanings. In a narrow sense, the government only includes executive powers, namely the President, Vice President, and ministers as stipulated in the 1945 Constitution. Meanwhile, in a broad sense, the government

includes all state institutions, both executive and legislative, including the DPR.

In general, the government refers to a group of people who have the official authority to exercise state power, formulate and implement policies, and are responsible for improving the welfare of the community. Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is stated that Village Government is the implementation of government affairs and the interests of local communities within the framework of the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (Sugiman, 2018).

Law Number 6 of 2014 states that the implementation of village government is carried out with reference to the following principles: 1) legal certainty; 2) Orderly governance; 3) organized public interest; 4) openness or transparency; 5) proportionality; 6) accountability or accountability; 7) effectiveness and efficiency; 8) local wisdom; 9) diversity; and 10) participatory (Novitasari & Iswara, 2024).

Thus, the implementation of village government based on the principles of legal certainty, administrative order, integrated public interest, transparency, justice, accountability, efficiency and effectiveness, local wisdom, diversity, and community participation is aimed at building a good, open, and comprehensive government system. This is done to support sustainable village development, improve people's living standards, and strengthen social harmony and cultural values at the local level.

RESEARCH METHODS

This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Sugiyono (2022) in his book explains, the qualitative method is rooted in the philosophy of phenomenology, which aims to understand a phenomenon in depth through the perspective of the individual experience that is the subject of research. This approach is descriptive and interpretive, and emphasizes the importance of natural context in data collection. The data used in this study is subjective data, obtained from respondents who act as informants through interviews, and is

equipped with documentation data. The data collection technique is carried out through field studies, namely by conducting a direct survey of the research object, using recorded interviews. The object of this research is the Village Apparatus located in Serdang Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency.

RESULTS AND DISCUSSION

Research Results

Information obtained from interviews with Serdang Village officials, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency, shows that the implementation of SAP has a positive impact on increasing transparency and accountability in public financial management at the village level.

Serdang Village has utilized the Siskeudes application in village financial management, the implementation of which refers to the SAP guidelines set by the local government. In the planning process, village officials involve community participation through deliberative forums which are generally held in the last quarter of each year. In addition, this activity is an opportunity to compile an accountability report as a tangible form of accountability. Meanwhile, to support transparency, budget information, and its realization are published through banners installed at the Village Hall, so that all residents can easily access the data every year, said Mr. Rifki as the financial manager of Serdang Village.

Here is a further explanation:

Implementation of Government Accounting Standards (SAP):

The Serdang Village Government has implemented the Village Financial System (Siskeudes) in accordance with accrual-based Government Accounting Standards as stipulated in Government Regulation Number 71 of 2010. The implementation of the Siskeudes application helps in an integrated village financial management, including stages ranging from planning, implementation,

recording, to the preparation of financial statements. The main purpose of using this system is to strengthen transparency, accountability, and efficiency in village financial management.

In the process of preparing the budget, the village government involves various elements of the community, such as representatives of residents, religious leaders, and youth leaders, through village deliberative forums which are routinely held at the end of each year. To support information disclosure, financial reports are submitted transparently through the installation of banners at the village hall, which include the details of the budget and the realization of its use every year. In this way, the community can easily gain access to village financial information.

Transparency in Financial Management

Financial transparency in Serdang Village can be accessed by the community through budget banners at the village hall. So that the community can find out the budget allocation, realization of expenses, and the results of activities funded by village funds.

Picture 1. Realization of the Serdang Village APB TA. 2023

Description	Income		
Total Revenue	Idr 2,047,827,202,58		
Description	Budget Ceiling	Realization	About
Income			
Transfer Income	Idr	Idr	Idr
- Village Fund	2,079,894,861,00	2,029,981,396,00	49,913,465,00
- Tax Revenue Sharing And Restitution	Idr	Idr	Idr-
- Village Fund Allocation	1334.480.000,00	1.334.480.000,00	
- Provincial Financial Aid	Idr	Idr	Idr-
- Miscellaneous Income	182.802.300,00	182.802.300,00	
Total Revenue	556.612.561,00	506.669.096,00	49,913,465,00
	Idr 6,000,000,00	Idr 6,000,000,00	Idr-
	Idr	Idr	Idr
	16.635.000,00	17.845.806,58	1,210,806,58
	Idr	Idr	Idr
	2,096,529,861,00	2,047,827,202,58	48,702,658,42
Description	Village Shopping		
Amount Of Village Expenditure	Idr 2,040,307,664,25		
Description	Budget Ceiling	Realization	About
Shop			
Field Of Village Government Administration	Idr	Idr	Idr
Field Of Rural Development Implementation	1,403,731,530,74	1,310,999,176,25	902,732,354,49
Field Of Community Development	Idr	Idr	Idr-
Empowerment Field Disaster Management, Emergency	280.829.900,00	280.829.900,00	
	Idr	Idr	Idr
	113,206,588,24	105,006,588,00	8,200,000,24
	Idr	Idr	Idr
	276,396,000,00	206,672,000,00	69,724,000,00
	Idr	Idr	-
	136.800.000,00	136.800.000,00	
Description	Budget Ceiling	Realization	About
Surplus			
Financing	Idr	Idr	Idr
Net Financing	114,434,157,98	114,434,157,98	121,953,696,31
	Idr	Idr	Idr-
	114,434,157,98	114,434,157,98	
Silpa For The Current Year	Idr-	Idr	Idr
		121,953,696,31	121,953,696,31

Data Source: Serdang Village Finance (2023)

Picture 2. Realization of the Serdang Village APB TA. 2024

Description	Income		
Total Revenue	2.150.625.724,07		
Description	Budget Ceiling	Realization	About
Income			
Transfer Income	Idr 2,084,495,560,00	Idr 2,148,190,332,00	Idr 63,694,772,00
- Village Fund	Idr 1,344,273,000,00	Idr 1,344,273,000,00	Idr-
- Tax Revenue Sharing And Restitution	Idr 116.524.800.00	Idr 191.314.100.00	Idr 74,789,300,00
- Village Fund Allocation	Idr 623,697,760,00	Idr 612.603.232.00	Idr 11,094,528,00
- Provincial Financial Aid	Idr-	Idr-	Idr-
- Miscellaneous Income	Idr-	Idr 2,435,392.07	Idr 2,435,392.07
Total Revenue	Idr-	Idr 2,150,625,724,07	Idr 66,130,164,07
Description	Village Shopping		
Amount Of Village Expenditure	Idr 2,040,307,664,25		

Data Source: Serdang Village Finance (2024)

Accountability in Financial Management

Accountability in Serdang Village is realized through accountability reporting to the community which is carried out in conjunction with budget planning deliberations. As the Village Head, Mr. Supriyono, S.E ensures that financial statements are prepared in accordance with applicable regulations, including Permendagri Number 20 of 2018.

The use of Siskeudes simplifies the financial reporting process, reduces the potential for errors in financial management, and increases public trust.

In the submission of accountability reports by village officials to the community, there were criticisms submitted regarding infrastructure development in Serdang Village. Mr. Jumadi as the Head of IB Hamlet said:

"... that some people are dissatisfied with the construction of roads in their hamlets, because they are not immediately repaired" while the Serdang village apparatus itself already has priority targets that are adjusted to its *urgency* gradually, such as the construction of roads in schools, food security roads and then continued the construction of other roads.

Public criticism regarding the quality of road construction reflects a gap in information disclosure related to the project. Based on the

theory of public accountability put forward by Bovens (2007), dissatisfaction from citizens can be interpreted as an indication of a lack of clear and open communication between the government and the community, especially regarding the use of the budget and the quality standards of the work implemented.

Community Participation

The people of Serdang Village are actively involved in the planning, implementation, and evaluation stages of the village budget through deliberative forums that are regularly held. This involvement is realized through various ways, such as attending village meetings, conveying aspirations related to development priorities, supervising the use of funds, and participating in activities financed by village funds, such as mutual cooperation in infrastructure development. The form of citizen participation includes providing ideas, energy, and supervisory functions. Thus, the results of development can be felt fairly by all levels of citizens. This active involvement also strengthens participation in decision-making, as well as fosters a sense of belonging and shared responsibility for village progress.

DISCUSSION

This research proves that the implementation of Government Accounting Standards in Serdang Village has a great impact in encouraging transparency and accountability in public financial management. The following description presents a discussion that relates the research findings to the theoretical foundations that have been studied in the literature review:

Relationship with Agency Theory

In village financial management, the agency theory is relevant because the village head and the village apparatus act as agents who are given responsibility by the community (*principal*) to manage village funds for the current year, both those that have been realized and those that have not been realized. In Serdang Village, the village development planning process begins in stages through the

Hamlet Conference (MusDus), where village officials and the community are committed and participate directly. Every community has the opportunity to provide constructive proposals. These proposals are accommodated in advance to determine the priority scale. From the results of the Musdus, the Village Apparatus proposed to the District through the District Meeting (Muscam), which is carried out once a year, said Mrs. Siti in the interview process.

The relationship between agency theory and this research lies in the function of the government as an agent responsible for formulating strategies to seek the best service for the community as the principal. Agents are expected to be able to show their best performance to the principal, one of which is reflected in the quality of service and good financial reports. This performance is greatly influenced by the strategy implemented by the government. The better the performance shown, the level of public trust in the government will increase. Therefore, choosing the right strategy is an important factor because it has a direct effect on public trust. In this context, the application of SAP in public financial management acts as a control tool from the perspective of agency theory. By allocating a budget to support the implementation of SAP, it is hoped that it can increase transparency and accountability and reduce the potential for abuse of authority by the agency, namely the government.

Relationship with Legitimacy Theory

In the context of governance, legitimacy is obtained through financial governance that is transparent, accountable, and compliant with applicable regulations.

The application of Government Accounting Standards (SAP) and community involvement in village deliberative forums are tangible manifestations of the application of this theory. Information disclosure and citizen participation are important elements in building community support. Village deliberations (Musdes) are the main means of forming social legitimacy, because through this forum, residents can be directly involved in the decision-making process. This involvement

shows that the village government respects the input and aspirations of its citizens, so that every policy set has strong legitimacy.

This research bases village financial management on the principles of transparency and accountability, which are in line with the concept of legitimacy. The management of village funds that is carried out openly and accountably not only creates good financial governance, but also increases public trust and strengthens support for various development programs run by the village government.

Transparency and Accountability

Transparency is an important principle in realizing accountable financial management, which must be applied comprehensively from the planning stage to accountability (Badiul, 2020). This principle guarantees the right of the public to obtain relevant information related to the activities of organizations or individuals, including financial information, programs, and distribution of benefits. More than just openness, transparency reflects the government's commitment to providing broad access to information as an effort to build and strengthen public trust, as the public has the right to accurate and adequate information (Novitasari & Iswara, 2024).

After understanding the concept of transparency, the results of our research show that based on information from the Serdang Village apparatus, the village government has provided financial information regarding the budget and budget realization through a banner installed in front of the village office. In addition, Serdang Village has also implemented a Village Financial System (Siskeudes) which helps facilitate the financial management process, especially in recording and administration. The use of Siskeudes allows access to financial reports and documents quickly, precisely, and accurately. However, access to this system is still limited only to village officials or related parties, so the general public cannot access it freely anytime and anywhere. Even so, if information is urgently needed, village officials can immediately access data through the system.

To find out the extent of community participation in village development, the Serdang Village apparatus stated that residents are given space to be directly involved as workers in development projects. This participation also serves as a form of joint supervision between the community and the village apparatus. Before the project is implemented, planning is carried out which includes the identification of the type of development, sources of financing, and other technical needs. This aims to ensure that the community can be actively involved in the development process while reflecting the implementation of the principle of accountability by the village government.

The use of village funds for activities such as posyandu services and road infrastructure development requires the application of the values of transparency and accountability, in order to ensure that the budget is used optimally and on target, as well as fostering public trust.

This synergy between transparency and accountability is the basis for the creation of *good governance* in Serdang Village. As stated in the introduction, open and accountable public sector financial management is the main foundation in realizing (*good governance*).

CONCLUSION

This study shows that in Serdang Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency, it can be concluded that the implementation of Government Accounting Standards (SAP) in Serdang Village, in accordance with Government Regulation Number 71 of 2010, has had a significant impact on increasing transparency and accountability in public financial management at the village level through the use of the Siskeudes application. Transparency is reflected in the disclosure of information that can be accessed by the public through the display of budget banners and the implementation of village deliberations, while accountability is realized through systematic financial accountability reporting, conveyed to the community during village deliberations in conjunction with the annual budget planning

process. Overall, the implementation of SAP in Serdang Village strengthens the principles of good governance and has the potential to improve community welfare through targeted budget allocation with more transparent, accountable, and participatory financial management. Community participation in village deliberations ensures that village funds are used for programs that are in accordance with public needs, such as infrastructure development, economic empowerment, or improvement of public services.

SUGGESTION

The village government is advised to develop digital facilities, such as village websites or mobile applications, to provide easy access for the community to village financial information anytime and anywhere. This aims to expand the reach of information, especially for people who do not have the opportunity to visit the village office in person on a regular basis. In addition, it is important for village officials to be able to increase the capacity and competence of apparatus in implementing Government Accounting Standards (SAP) and financial technology through continuous training and education programs. In addition, in order for financial management to run well, village officials need to build strong communication at every stage. Evaluation of the performance of the program that has been carried out also needs to be carried out regularly by the village apparatus. To deepen the study related to the implementation of Government Accounting Standards (SAP), further research can be focused on analyzing the qualitative impact of the application of the principles of transparency and accountability to improve people's welfare. The focus includes, among other things, its impact on reducing poverty rates or increasing community satisfaction with the services provided by the village government.

BIBLIOGRAPHY

Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analysis of the Implementation of Good Governance, Government

- Accounting Standards, and Agency Accounting Systems on the Quality of Financial Statements. *Valid: Scientific Journal*, 18(2), 136–147.
- CPC. (2010). *Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards (SAP)*.
- Jauhari, H., Hazisma, S., & Dewata, E. (2021). THE INFLUENCE OF REGIONAL FINANCIAL ACCOUNTING SYSTEMS AND GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS ON THE QUALITY OF GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS. *Journal of Accounting Scientific Studies*, 8(1), 104–121.
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analysis of the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards in the Presentation of Financial Statements in the Bitung City Government. *EMBA Journal*, 3(1), 1–8.
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Application of the principles of accountability and transparency in managing village finances. *Journal of Accounting and Governance*, 1(1), 57.
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). The application of the principles of transparency and accountability in the management of the village revenue and expenditure budget. *Journal of Accounting Science and Research*, 13(6), 17.
- Nur, S. W. (2021). ACCOUNTABILITY AND TRANSPARENCY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN TELLUMPANUAE VILLAGE, MAROS REGENCY. PROCEEDINGS OF THE 2021 NATIONAL SEMINAR ON ECONOMICS AND BUSINESS, UNIVERSITY OF MUHAMMADIYAH JEMBER, 725–739.
- Rusrina, R. (n.d.). The Effect of Transparency and Accountability Values on Public Sector Financial Management at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province. *PINISI JOURNAL OF ART, HUMANITY & SOCIAL STUDIES*, 1–9.
- Salle, A. (2017). The Meaning of Transparency in Regional Financial Management. *KEUDA (Journal of Regional Economic and Financial Studies)*, 1(1), 1–19.
- Saputri, H., & Farida, I. (2025). Analysis of the Implementation of Government Accounting Standard Statement (PSAP) No. 01 concerning Village Financial Statements (Study on Awolagading Village, Awangpone District, Bone Regency). *Scientific Journal of Mandalika*, 6(9), 3521–3531.
- Sari, V. K., & Widyawati, D. (2021). Transparency and accountability of the village government in the management of village fund allocation. *Journal of Accounting Science and Research*, 10(7), 1–16.
- Sugiman. (2018). Village Government. *Binamulia Law*, 7(1), 82–95. <https://media.neliti.com/media/publications/275406-pemerintahan-desa-bc9190f0.pdf>
- Sugiyono. (2022). *Qualitative Research Methods*. Alfabet.
- Sutrisno, S., & Astuti, I. (2024). The Effect of the Implementation of Government Accounting Standards and the Quality of Financial Statements on the Performance Accountability of Government Agencies in the State Cyber and Cryptography Agency. *Alliance: Journal of Management and Business*, 18(2), 185–198.
- Tarigan, E. P. A., & Nurtanzila, L. (2013). Government Accounting Standards in Realizing Accountability and Transparency in Regional Financial Management. *Journal of Policy & Public Administration*, 17(1).

**EVALUASI PELELANGAN DAN PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN
DINAS PEMERINTAH DAERAH KOTA KUPANG
(STUDI PADA BKAD KOTA KUPANG)**

Emanuello Elman Peter Logo

Universitas Nusa Cendana

elmanlogo2508@gmail.com

Rikhard Titing Christopher Bolang

Universitas Nusa Cendana

rikhard.bolang@staf.undana.ac.id

Olivia Louise Eunike Tomasowa

Universitas Nusa Cendana

olivia.tomasowa@staf.undana.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) serta menentukan posisi atribut dalam Diagram Kartesius *Importance–Performance Analysis* (IPA) pada pelaksanaan pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas di BKAD Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden dan dianalisis menggunakan metode IPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,74 berada pada kategori sangat penting, sedangkan nilai rata-rata tingkat kinerja sebesar 4,52 menunjukkan bahwa pelaksanaan telah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antara tingkat kepentingan dan kinerja pada beberapa atribut. Hasil pemetaan Diagram Kartesius menunjukkan bahwa atribut A6 (kelengkapan berkas usulan dari OPD) dan C3 (kesesuaian harga limit lelang dengan kondisi pasar) berada pada Kuadran I sebagai prioritas utama perbaikan. Secara keseluruhan, pengelolaan aset telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan pada aspek administrasi dan penentuan harga limit agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip pengelolaan aset daerah.

Kata kunci : *Importance–Performance Analysis, Pengelolaan Aset Daerah, Pelelangan Aset, Penghapusan Aset, Kinerja Pelayanan, Barang Milik Daerah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the levels of importance and performance and to determine the position of attributes in the Cartesian Diagram of Importance–Performance Analysis (IPA) in the implementation of the auction and disposal of official vehicle assets at the Regional Financial and Asset Management Agency (BKAD) of Kupang City. This research employed a quantitative approach with a descriptive method. Data were collected through questionnaires distributed to 30 respondents and analyzed using the IPA method. The results indicate that the average importance score of 4.74 falls into the “very important” category, while the average performance score of 4.52 suggests that the implementation has generally been carried out well. However, a gap still exists between importance and performance in several attributes. The Cartesian Diagram mapping reveals that attributes A6 (completeness of asset disposal proposal documents from regional work units) and C3 (appropriateness of auction reserve prices with market conditions) are positioned in Quadrant I as top priorities for improvement. Overall, asset management has been implemented fairly well; however, improvements are still required in administrative aspects and in determining auction reserve prices to enhance effectiveness, efficiency, and compliance with public asset management principles.

Keywords : *Importance–Performance Analysis, Regional Asset Management, Asset Auction, Asset Disposal, Service Performance, Regional Government Assets*

PENDAHULUAN

Pengelolaan aset daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan good governance, khususnya dalam menjamin efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan sumber daya publik (Machmud *et al.*, 2023). Efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tidak hanya mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga menunjukkan kemampuan aparatur dalam mengoptimalkan aset publik agar memberikan manfaat yang maksimal (Hanis, 2012). Secara normatif, pengelolaan BMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun, 2024 yang mengatur pengelolaan aset mulai dari perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah. Pada tingkat daerah, pengelolaan aset di Kota Kupang juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun, 2023 sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan data internal BKAD Kota Kupang tahun 2025, jumlah kendaraan dinas Pemerintah Kota Kupang mencapai 1.793 unit. Namun, hasil observasi awal menunjukkan bahwa proses pelelangan dan penghapusan kendaraan dinas belum berjalan optimal. Dari total unit kendaraan yang diproses pada periode 2023–2025, masih terdapat 28 unit yang belum terjual atau masih berada dalam proses penilaian dan pelelangan lanjutan. Kondisi ini menunjukkan adanya *empirical gap* antara ketentuan regulasi yang mengharuskan aset non-produktif segera dilelang dan dihapus dengan kondisi aktual di lapangan yang masih mengalami keterlambatan dan hambatan administratif maupun teknis.

Hasil observasi awal di BKAD Kota Kupang menunjukkan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, kendala administrasi berupa ketidaklengkapan dokumen kendaraan seperti BPKB dan STNK serta rendahnya respons OPD dalam mengusulkan penghapusan aset. Kedua, kendala teknis pada proses penentuan harga limit lelang yang menyebabkan antrean

penilaian dan harga limit yang dinilai terlalu tinggi sehingga aset tidak laku dilelang. Ketiga, lemahnya pengawasan fisik kendaraan sebelum pelelangan yang berpotensi menurunkan nilai aset akibat pengambilan komponen kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tingkat kepentingan atribut pengelolaan aset dengan tingkat kinerja aktual di lapangan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Molidya *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah masih menghadapi ketidakseimbangan antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja atribut pengelolaan aset, khususnya pada aspek prosedur dan inventarisasi aset. Penelitian lain oleh Tunga, (2020) juga menegaskan bahwa metode *Importance–Performance Analysis* (IPA) efektif digunakan untuk mengidentifikasi atribut prioritas perbaikan dalam sistem pengelolaan organisasi. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada pengelolaan aset secara umum dan belum secara spesifik mengkaji pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas pada pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya hanya memetakan atribut ke dalam kuadran IPA tanpa menjelaskan secara rinci faktor-faktor teknis yang menyebabkan rendahnya kinerja pada atribut tertentu. Padahal, dalam konteks pelelangan dan penghapusan kendaraan dinas, faktor seperti kelengkapan administrasi usulan OPD, mekanisme penentuan harga limit lelang, dan pengawasan fisik kendaraan memiliki pengaruh langsung terhadap keterlambatan penghapusan aset dan rendahnya tingkat keberhasilan pelelangan. Maka, masih terdapat *research gap* berupa keterbatasan penelitian yang menghubungkan analisis IPA dengan permasalahan teknis pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas di lingkungan pemerintah daerah.

Berdasarkan permasalahan dan *gap* penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) atribut dalam proses pelelangan dan penghapusan aset

kendaraan dinas di BKAD Kota Kupang, serta menentukan atribut yang menjadi prioritas perbaikan melalui pemetaan Diagram Kartesius menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih terfokus, berbasis data kuantitatif, dan dapat menjadi dasar perbaikan pengelolaan aset daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

KAJIAN TEORI

Good Governance dalam Pengelolaan Aset Daerah

Konsep *good governance* menjadi landasan utama dalam pengelolaan keuangan dan aset publik. Menurut (Andhika, 2017), *good governance* mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. (Soleh & Rochmansjah, 2010) menekankan bahwa tata kelola yang baik juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik.

Dalam konteks pengelolaan aset daerah, prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi menjadi indikator utama keberhasilan. (Mulyana, 2023) menjelaskan bahwa setiap tahapan pengelolaan aset, termasuk pelelangan dan penghapusan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Keterlambatan proses serta kehilangan komponen aset menunjukkan lemahnya penerapan prinsip tersebut.

Manajemen Aset Publik

Manajemen aset publik merupakan proses pengelolaan sumber daya milik pemerintah secara sistematis untuk mencapai tujuan pelayanan publik. (Hanis, 2012) mendefinisikan manajemen aset sebagai siklus yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. (Giglio et al., 2018) menambahkan bahwa pendekatan *life cycle* dalam manajemen aset penting untuk memastikan setiap aset memberikan manfaat optimal sepanjang masa penggunaannya. Dalam praktiknya, kegagalan pada tahap akhir, seperti

penghapusan aset, dapat menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran.

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan seluruh aset yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang sah (Basri, 2021). Pengelolaan BMD mencakup seluruh siklus mulai dari perencanaan hingga penghapusan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Hanis, 2012) menyatakan bahwa pengelolaan BMD harus memenuhi prinsip efisiensi, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, (Firmansyah, 2024) menekankan pentingnya evaluasi terhadap aset yang sudah tidak produktif untuk segera dilakukan pelelangan atau penghapusan guna menghindari beban biaya yang tidak perlu.

Secara regulatif, pengelolaan BMD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun, 2024 dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun, 2023, yang mengatur secara teknis proses penghapusan dan pemindahtanganan aset daerah.

Value for Money (VFM)

Konsep *Value for Money* (VFM) merupakan prinsip yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi dalam penggunaan sumber daya publik. Septariani (2018) menjelaskan bahwa VFM menjadi indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan aset, prinsip ini menuntut agar aset yang tidak lagi memberikan manfaat segera dihapus atau dialihkan. Keterlambatan dalam proses pelelangan dan penghapusan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip efisiensi dan efektivitas, karena aset tetap menimbulkan biaya tanpa menghasilkan nilai manfaat.

Importance-Performance Analysis (IPA)

Metode *Importance-Performance Analysis* (IPA) diperkenalkan oleh (Martilla & James, 1977) sebagai alat untuk

mengukur kinerja berdasarkan persepsi tingkat kepentingan dan kinerja. Metode ini memetakan atribut ke dalam empat kuadran pada Diagram Kartesius, yaitu prioritas utama, pertahankan kinerja, prioritas rendah, dan berlebihan.

IPA banyak digunakan dalam berbagai penelitian untuk mengidentifikasi atribut yang perlu ditingkatkan kinerjanya. Dalam konteks penelitian ini, IPA digunakan untuk mengevaluasi atribut dalam proses pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas, sehingga dapat diketahui prioritas perbaikan yang paling mendesak.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data numerik untuk menganalisis fenomena secara objektif dan sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengevaluasi tingkat kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*) atribut dalam proses pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA).

Data diperoleh dari persepsi responden yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin terhadap dua variabel utama, yaitu kepentingan dan kinerja, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui tingkat kesenjangan (*gap*) antara harapan dan kinerja aktual. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara sebagai informasi pelengkap untuk memperkuat dan menjelaskan hasil analisis kuantitatif.

Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan orientasi evaluatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi aktual secara sistematis dan faktual berdasarkan data numerik tanpa melakukan manipulasi variabel.

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur serta mengevaluasi tingkat kepentingan dan kinerja atribut dalam

proses pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data kualitatif yang diperoleh melalui wawancara guna memberikan penjelasan kontekstual dan memperkuat interpretasi hasil analisis kuantitatif, tanpa mengubah pendekatan utama penelitian yang tetap bersifat kuantitatif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya proses pelelangan dan penghapusan kendaraan dinas. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansi tugas dan fungsi BKAD dengan fokus penelitian. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data, pengolahan, hingga analisis hasil penelitian.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif merupakan data utama yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden untuk menilai tingkat kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*) atribut dalam proses pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas. Sementara itu, data kualitatif digunakan sebagai pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta memperkuat interpretasi hasil analisis.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kuesioner dan wawancara dengan responden yang terkait dengan pengelolaan aset. Adapun data sekunder diperoleh dari dokumen dan sumber resmi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun, 2024, Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun, 2023, serta data terkait jumlah, penjualan, dan pelelangan

aset kendaraan dinas di Kota Kupang periode 2023–2025.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang yang berjumlah 86 orang.

Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi pegawai yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses administrasi penghapusan aset, inventarisasi kendaraan dinas, pengamanan dan pengawasan aset, proses penilaian dan pelelangan aset, serta pengelolaan data Barang Milik Daerah (BMD). Responden berasal dari bidang aset yang terkait dengan pengelolaan aset di lingkungan BKAD Kota Kupang dan dianggap memahami kondisi aktual pelaksanaan pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 responden. Jumlah tersebut dinilai telah mewakili responden yang memiliki kompetensi dan pengalaman terkait proses pengelolaan aset kendaraan dinas sehingga dapat memberikan informasi yang relevan terhadap analisis tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) dalam penelitian ini.

Operasional Variabel Penelitian

variabel yang diukur terdiri dari dua dimensi utama, yaitu tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) terhadap atribut-atribut dalam proses pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas di BKAD Kota Kupang.

Operasionalisasi atribut penelitian yang akan dianalisis menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA), dengan mengukur tingkat Kepentingan (*Importance*) dan Kinerja (*Performance*) terhadap proses penghapusan dan pelelangan aset kendaraan dinas, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun, 2024 dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun, 2023:

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

Dimensi	Kode	Indikator Utama
Legalitas & Administrasi	A1–A8	Kelengkapan dokumen, validasi identitas kendaraan, kejelasan asal-usul, kelengkapan berkas OPD, akurasi data
Fisik & Pengamanan	B1–B6	Keamanan penyimpanan, perlindungan fisik, pengawasan komponen, kondisi kendaraan, pencatatan aset
Penilaian & Pelelangan	C1–C7	Kecepatan penilaian, kesesuaian metode, harga limit, transparansi, publikasi, prosedur, jadwal lelang
Koordinasi & Kompetensi	D1–D5	Koordinasi antar instansi, respons OPD, responsivitas petugas, pemahaman regulasi, konsistensi prosedur
Akuntabilitas & Dampak	E1–E6	Setoran hasil lelang, pembaruan data, pelaporan, tingkat keberhasilan lelang, pengurangan backlog, efisiensi biaya

Sumber; Diolah Peneliti, 2025

Tabel 1: Menunjukkan indikator dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima dimensi utama yang menggambarkan tahapan dan aspek penting dalam proses pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas di BKAD Kota Kupang. Dimensi Legalitas dan Administrasi (A) mencakup indikator yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen, keabsahan identitas kendaraan, serta ketepatan proses administrasi sebagai dasar legal pelaksanaan penghapusan dan pelelangan aset. Dimensi Fisik dan Pengamanan (B) berkaitan dengan kondisi fisik kendaraan, keamanan penyimpanan, pengawasan komponen kendaraan, serta sistem pengendalian fisik aset agar nilai aset tetap terjaga sebelum dilelang.

Selanjutnya, dimensi Penilaian dan Pelelangan (C) mencakup indikator mengenai proses penilaian kendaraan, penetapan harga limit, transparansi pelelangan, hingga efektivitas pelaksanaan lelang. Dimensi Koordinasi dan Kompetensi (D) berkaitan dengan kerja sama antar instansi, responsivitas petugas, pemahaman regulasi, dan konsistensi pelaksanaan prosedur penghapusan aset. Adapun dimensi Akuntabilitas dan Dampak Proses (E) mencakup indikator yang menilai pertanggungjawaban hasil pelelangan, pemutakhiran data aset, keberhasilan penjualan kendaraan, serta dampak penghapusan terhadap pengurangan backlog aset dan efisiensi biaya pemeliharaan.

Seluruh indikator tersebut diukur berdasarkan tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat kepentingan (*importance*) dan kinerja (*performance*) setiap atribut menggunakan skala Likert 5 poin. Skor 1 (Sangat Tidak Penting), Skor 2 (Tidak Penting), Skor 3 (Cukup Penting), Skor 4 (Penting) dan Skor 5 (Sangat Penting)

Wawancara dilakukan secara terbatas kepada informan kunci untuk memperoleh informasi pendukung dan memperkuat interpretasi hasil analisis. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa peraturan dan dokumen terkait pengelolaan serta pelelangan aset kendaraan dinas.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA) untuk membandingkan tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) setiap atribut. Sebelum analisis utama dilakukan, instrumen

penelitian diuji melalui uji validitas dan reliabilitas.

Uji validitas menggunakan korelasi Pearson Product Moment untuk memastikan setiap item mampu mengukur variabel secara tepat, sedangkan uji reliabilitas menggunakan metode *Cronbach's Alpha* untuk menguji konsistensi instrumen, dengan kriteria nilai $\geq 0,60$ dinyatakan reliabel.

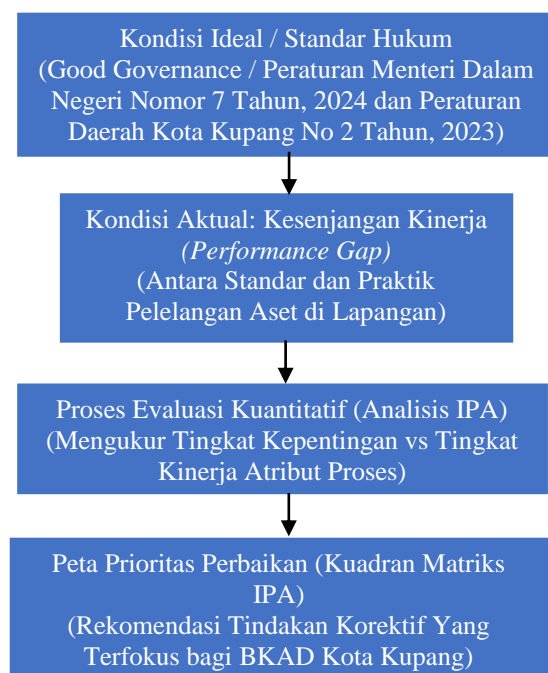
Selanjutnya, analisis IPA dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata kepentingan dan kinerja setiap atribut, menghitung tingkat kesesuaian, serta menentukan nilai rata-rata keseluruhan (*grand mean*) sebagai titik pembagi dalam Diagram Kartesius.

Hasil *Importance-Performance Analysis* (IPA) dipetakan ke dalam Diagram Kartesius yang terbagi menjadi empat kuadran berdasarkan nilai rata-rata kepentingan dan kinerja. Kuadran I (prioritas utama) menunjukkan atribut dengan tingkat kepentingan tinggi namun kinerja rendah sehingga menjadi fokus utama perbaikan. Kuadran II (pertahankan kinerja) mencerminkan atribut yang penting dan telah memiliki kinerja baik sehingga perlu dipertahankan. Kuadran III (prioritas rendah) berisi atribut dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang relatif rendah sehingga tidak menjadi fokus utama. Sementara itu, Kuadran IV (berlebihan) menunjukkan atribut dengan kinerja tinggi namun tingkat kepentingannya rendah, sehingga terdapat potensi pengalihan sumber daya ke atribut yang lebih prioritas. Pemetaan ini menjadi dasar dalam menentukan strategi peningkatan kinerja pengelolaan aset kendaraan dinas secara lebih efektif dan efisien.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibangun secara deduktif, dimulai dari landasan normatif, dihadapkan dengan kondisi empiris yang bermasalah, dan diakhiri dengan penggunaan metode kuantitatif *Importance-Performance Analysis* (IPA) sebagai solusi diagnostik untuk menentukan prioritas perbaikan.

Gambar 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah Peneliti 2026

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada konsep bahwa efektivitas pengelolaan aset kendaraan dinas dapat dievaluasi melalui perbandingan antara tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) setiap atribut. Atribut penelitian disusun berdasarkan prinsip manajemen aset publik, *good governance*, serta ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode *Importance-Performance Analysis* (IPA) untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kinerja aktual, serta menentukan prioritas perbaikan melalui pemetaan ke dalam Diagram Kartesius. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai *corrected item-total correlation* yang lebih besar dari r

tabel (0,361). Maka, seluruh item instrumen penelitian dinyatakan valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *Cronbach Alpha* pada variabel *Importance* sebesar 0,957 dan variabel *Performance* sebesar 0,961 lebih besar dari 0,6 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata dan Tingkat Kesesuaian

Indikator	Mean I	Mean P	Gap (I-P)	Kesesuaian %
A1	4,70	4,53	0,17	96,38%
A2	4,70	4,53	0,17	96,38%
A3	4,83	4,63	0,20	95,85%
A4	4,86	4,63	0,23	95,26%
A5	4,90	4,60	0,30	93,87%
A6	4,80	4,33	0,50	90,22%
A7	4,73	4,60	0,13	97,25%
A8	4,63	4,63	0,00	100,00%
B1	4,73	4,20	0,53	88,79%
B2	4,70	4,06	0,64	86,38%
B3	4,63	4,16	0,47	89,84%
B4	4,63	4,26	0,37	92,01%
B5	4,76	4,56	0,20	95,79%
B6	4,73	4,43	0,30	93,65%
C1	4,60	4,23	0,37	91,95%
C2	4,73	4,50	0,23	95,13%
C3	4,80	4,40	0,40	91,66%
C4	4,83	4,70	0,13	97,30%
C5	4,70	4,66	0,04	99,14%
C6	4,83	4,86	-0,03	100,62%
C7	4,76	4,66	0,10	97,89%
D1	4,90	4,86	0,04	99,18%
D2	4,70	4,33	0,37	92,12%
D3	4,76	4,70	0,06	98,73%
D4	4,80	4,56	0,24	95,00%
D5	4,70	4,63	0,07	98,51%
E1	4,76	4,70	0,06	98,73%
E2	4,63	4,63	0,00	100,00%
E3	4,76	4,70	0,06	98,73%
E4	4,70	4,36	0,34	92,76%
E5	4,73	4,56	0,17	96,04%
E6	4,70	4,56	0,14	97,02%

Tabel 2: menunjukkan bahwa nilai rata-rata tingkat kepentingan *mean importance*

menggambarkan tingkat harapan responden terhadap pentingnya setiap atribut dalam pelaksanaan pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas. Semakin tinggi nilai *mean importance*, maka atribut tersebut dinilai semakin penting oleh stakeholder. Selanjutnya, nilai rata-rata tingkat kinerja *mean performance* menunjukkan kondisi aktual pelaksanaan di lapangan. Semakin tinggi nilai *mean performance*, maka semakin baik kinerja yang dirasakan oleh responden.

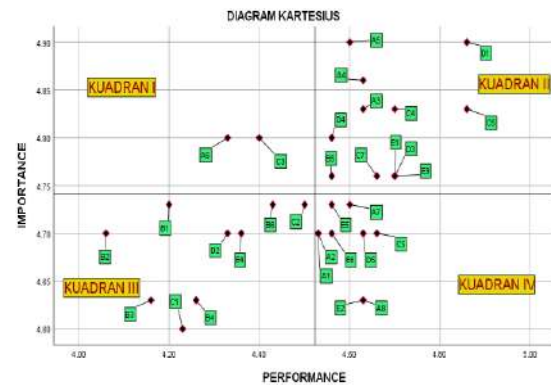
Perbandingan antara *mean importance* dan *mean performance* menghasilkan nilai *gap*, yaitu selisih antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja. Nilai *gap* digunakan untuk melihat besarnya kesenjangan antara harapan dan kondisi aktual. Semakin besar nilai *gap* positif, maka semakin besar perbedaan antara harapan dan kinerja, sehingga atribut tersebut menjadi prioritas untuk diperbaiki. Sebaliknya, nilai *gap* yang kecil atau mendekati nol menunjukkan bahwa kinerja sudah relatif sesuai dengan harapan, sedangkan nilai *gap* negatif mengindikasikan bahwa kinerja telah melampaui tingkat kepentingan.

Selain itu, tingkat kesesuaian menunjukkan persentase perbandingan antara kinerja dan kepentingan. Nilai kesesuaian yang mencapai atau melebihi 100% menunjukkan bahwa kinerja telah sesuai atau melampaui harapan responden. Sementara itu, nilai kesesuaian di bawah 100% menunjukkan bahwa kinerja belum sepenuhnya memenuhi harapan, sehingga masih diperlukan perbaikan pada atribut tersebut.

Perhitungan *grand mean* dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan *Microsoft Excel* untuk memperoleh nilai rata-rata keseluruhan dari tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) yang akan digunakan sebagai titik pembagi dalam Diagram Kartesius *Importance-Performance Analysis* (IPA). Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai rata-rata tingkat kepentingan (*grand mean*) sebesar 4,74 dan rata-rata tingkat kinerja sebesar 4,52. Nilai tersebut digunakan sebagai titik pembagi dalam diagram kartesius untuk menentukan posisi masing-masing atribut

ke dalam empat kuadran *Importance-Performance Analysis* (IPA).

Gambar 2. Diagram Kartesius IPA



Gambar 2: menunjukkan hasil pemetaan atribut ke dalam Diagram Kartesius *Importance-Performance Analysis* (IPA) menggunakan aplikasi SPSS berdasarkan nilai rata-rata tingkat kepentingan dan kinerja. Nilai grand mean kepentingan sebesar 4,74 dan kinerja sebesar 4,52 digunakan sebagai garis pembagi kuadran. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi setiap atribut dalam menentukan prioritas perbaikan dan kinerja yang perlu dipertahankan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai *grand mean importance* sebesar 4,74 mengindikasikan seluruh atribut berada pada kategori sangat penting menurut stakeholder. Sementara itu, nilai *grand mean performance* sebesar 4,52 menunjukkan bahwa kinerja pelaksanaan secara umum sudah baik, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan.

Perbedaan antara kepentingan dan kinerja menunjukkan adanya kesenjangan (*gap*) yang mencerminkan masih adanya ruang perbaikan dalam pengelolaan aset. Kesenjangan ini relevan dengan kondisi masih adanya kendaraan dinas yang tertunda proses pelelangan dan penghapusannya, sehingga analisis IPA menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan secara lebih terarah.

Pemetaan Diagram Kartesius menunjukkan bahwa atribut tersebar ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai rata-rata kepentingan (4,74) dan kinerja (4,52) sebagai titik pembagi.

1. Kuadran I (Prioritas Utama)

Kuadran I dalam penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan paling krusial antara tingkat kepentingan dan kinerja, di mana atribut dinilai sangat penting oleh stakeholder namun belum mampu diimplementasikan secara optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa ekspektasi stakeholder terhadap efektivitas proses pelelangan dan penghapusan aset belum terpenuhi, khususnya pada atribut A6 (kelengkapan berkas usulan dari OPD) dan C3 (kesesuaian harga limit lelang).

Atribut A6 memiliki nilai *gap* sebesar 0,50 dengan tingkat kesesuaian 90,22%, sedangkan atribut C3 memiliki *gap* sebesar 0,40 dengan tingkat kesesuaian 91,66%. Nilai *gap* yang relatif tinggi ini menunjukkan adanya selisih yang cukup besar antara harapan dan kondisi aktual, yang berarti kinerja pada kedua atribut tersebut belum mampu memenuhi tingkat kepentingannya. Dalam konteks IPA, kondisi ini menjadi indikator utama bahwa kedua atribut tersebut harus menjadi prioritas perbaikan karena secara langsung mempengaruhi efektivitas sistem.

Ekspektasi stakeholder pada atribut A6 berkaitan dengan tersedianya administrasi yang tertib, lengkap, dan tepat waktu. Secara teknis, berkas yang diharapkan meliputi BPKB, STNK, surat usulan penghapusan dari OPD, berita acara pemeriksaan fisik, dokumen pendukung kepemilikan, hingga surat keputusan penghapusan. Stakeholder mengharapkan bahwa seluruh dokumen tersebut telah diverifikasi secara internal oleh OPD sebelum diajukan ke BKAD, sehingga proses verifikasi dapat berjalan cepat dan tidak mengalami hambatan. Namun, kondisi aktual menunjukkan masih adanya keterlambatan pengajuan, ketidaklengkapan dokumen, serta ketidaksesuaian data administratif. Hal ini menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih lama dan berdampak langsung pada tertundanya proses pelelangan.

Pada atribut C3, ekspektasi stakeholder adalah penetapan harga limit yang realistis, objektif, dan mencerminkan kondisi pasar aktual. Harga limit diharapkan ditentukan berdasarkan hasil penilaian yang profesional dengan mempertimbangkan kondisi fisik

kendaraan, umur ekonomis, serta harga pasar sejenis. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya harga limit seringkali tidak sesuai dengan kondisi pasar, baik terlalu tinggi maupun kurang kompetitif. Dampaknya adalah rendahnya minat peserta lelang, kendaraan tidak terjual, dan akhirnya memperpanjang siklus penghapusan aset.

Kondisi ini secara langsung bertentangan dengan prinsip *value for money*, khususnya pada aspek efisiensi dan efektivitas, karena aset yang sudah tidak produktif justru terus menimbulkan biaya pemeliharaan. Selain itu, dari perspektif *good governance*, permasalahan ini mencerminkan belum optimalnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset. Jika dibandingkan dengan atribut lain seperti B1 dan B2 yang memiliki *gap* lebih besar (B1 0,53 dan B2 0,64), namun tidak masuk Kuadran I, hal ini disebabkan karena tingkat kepentingannya relatif lebih rendah dibandingkan A6 dan C3. Artinya, meskipun kesenjangan pada B1 dan B2 besar, stakeholder tidak menempatkan atribut tersebut sebagai faktor yang paling menentukan keberhasilan pelelangan dan penghapusan aset. Dengan kata lain, atribut pada Kuadran I bukan hanya ditentukan oleh besarnya *gap*, tetapi oleh kombinasi antara tingkat kepentingan yang tinggi dan kinerja yang rendah.

Maka, Kuadran I mencerminkan area kritis yang secara langsung berdampak pada terjadinya keterlambatan penghapusan aset, termasuk fenomena kendaraan dinas yang belum terjual. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek administrasi OPD dan penentuan harga limit lelang menjadi prioritas utama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pengelolaan aset daerah secara keseluruhan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tungga, (2020) dan Asyraini, (2023) yang menunjukkan bahwa atribut pada Kuadran I umumnya berkaitan dengan aspek administratif dan operasional yang memiliki kesenjangan tinggi antara kepentingan dan kinerja. Hasil penelitian ini berbeda dengan (Molidya *et al.*, 2022) yang tidak menemukan atribut pada Kuadran I, sehingga penelitian ini

menegaskan adanya titik lemah yang lebih spesifik dalam konteks pengelolaan aset di daerah.

Dari perspektif teori manajemen aset publik, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada tahap akhir siklus aset, yaitu pemindahtanganan dan penghapusan, yang seharusnya menjadi mekanisme untuk menjaga efisiensi aset. Jika dikaitkan dengan regulasi, kondisi ini juga menunjukkan belum optimalnya implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun, 2024 dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun, 2023, khususnya terkait persyaratan administratif dan mekanisme pelelangan.

Oleh karena itu, Kuadran I menjadi fokus utama perbaikan karena memiliki dampak paling signifikan terhadap kinerja sistem pengelolaan aset daerah, baik dari sisi administratif, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan.

2. Kuadran II (Pertahankan Kinerja)

Kuadran II mencerminkan kondisi ideal di mana atribut memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) yang sama-sama tinggi. Artinya, atribut-atribut dalam kuadran ini tidak hanya dianggap sangat penting oleh stakeholder, tetapi juga telah dilaksanakan dengan baik sehingga mampu memenuhi bahkan mendekati ekspektasi yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, atribut yang berada pada Kuadran II umumnya memiliki nilai *mean importance* di atas rata-rata ($\geq 4,74$) dan *mean performance* juga di atas rata-rata ($\geq 4,52$), dengan nilai *gap* yang relatif kecil bahkan mendekati nol. Sebagai contoh, atribut seperti C4 (transparansi penetapan harga limit) memiliki *gap* sebesar 0,13 dengan tingkat kesesuaian 97,30%, D1 (sinergi BKAD dengan KPKNL) dengan *gap* 0,04 dan kesesuaian 99,18%, serta E1 (kecepatan setoran hasil lelang) dengan *gap* 0,06 dan kesesuaian 98,73%. Bahkan terdapat atribut seperti C6 (kejelasan prosedur lelang) yang memiliki *gap* negatif -0,03 dengan tingkat kesesuaian 100,62%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui harapan stakeholder.

Nilai *gap* yang kecil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat

kesenjangan signifikan antara harapan dan kondisi aktual. Dengan kata lain sudah berjalan dengan baik yang berarti bahwa proses telah dilaksanakan secara konsisten, akurat, dan sesuai standar. Seperti tidak adanya kesalahan signifikan dalam data kendaraan, kejelasan prosedur yang mudah dipahami, transparansi informasi yang terbuka, serta koordinasi antar instansi yang berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

Ekspektasi stakeholder pada kuadran ini pada dasarnya berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu kepastian hukum, kejelasan prosedur, dan transparansi proses. Stakeholder mengharapkan bahwa setiap tahapan pengelolaan aset dapat dilakukan secara tertib, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses informasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi tersebut telah terpenuhi dengan baik, sehingga atribut-atribut dalam Kuadran II menjadi kekuatan utama dalam sistem pengelolaan aset.

Jika dibandingkan dengan Kuadran I, perbedaan utamanya terletak pada tingkat kesenjangan. Pada Kuadran II, meskipun tingkat kepentingannya sama-sama tinggi, kinerja juga mampu mengimbangi harapan, sehingga tidak menimbulkan masalah yang signifikan dalam proses pengelolaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak semua atribut yang penting mengalami permasalahan, melainkan terdapat aspek-aspek tertentu yang justru sudah berjalan optimal.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulianti & Umbara, (2020) dan Vidyanto *et al.*, (2023) yang menyatakan bahwa atribut dalam Kuadran II merupakan indikator keberhasilan pelayanan karena mampu mencapai tingkat kepuasan yang tinggi. Dari perspektif teori, kondisi ini mencerminkan keberhasilan penerapan prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung konsep manajemen aset publik yang menekankan pentingnya data yang akurat dan prosedur yang terstandarisasi.

Dalam konteks regulasi, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun, 2024 dan Peraturan Daerah Kota Kupang No 2

Tahun, 2023 telah berjalan dengan baik, khususnya terkait ketertiban administrasi, kejelasan prosedur, dan pelaksanaan pelelangan. Oleh karena itu, fokus pengelolaan pada Kuadran II bukan pada perbaikan, melainkan pada upaya mempertahankan konsistensi kinerja agar tetap stabil dan tidak mengalami penurunan di masa mendatang. Maka, Kuadran II dapat diartikan sebagai fondasi utama dalam pengelolaan aset daerah, yang harus dijaga keberlanjutannya karena berperan penting dalam mendukung efektivitas sistem secara keseluruhan.

3. Kuadran III (Prioritas Rendah)

Kuadran III menunjukkan atribut yang memiliki tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) yang relatif rendah, sehingga tidak menjadi prioritas utama dalam pengelolaan. Posisi ini mengindikasikan bahwa atribut-atribut tersebut dinilai kurang menentukan oleh stakeholder dalam keberhasilan utama proses pelelangan dan penghapusan aset, serta pelaksanaannya juga belum optimal. Namun, karena tingkat kepentingannya rendah, kesenjangan (*gap*) yang terjadi tidak memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas sistem secara keseluruhan.

Atribut pada Kuadran III umumnya memiliki nilai *mean importance* di bawah rata-rata ($\leq 4,74$) dan *mean performance* juga di bawah rata-rata ($\leq 4,52$), dengan nilai *gap* yang bervariasi namun tidak kritis secara strategis. Contohnya dapat dilihat pada atribut C1 (kecepatan proses penilaian kendaraan) dengan *gap* 0,37 dan tingkat kesesuaian 91,95%, serta D2 (respons OPD terhadap permintaan kelengkapan dokumen) dengan *gap* 0,37 dan kesesuaian 92,12%. Meskipun nilai *gap* ini tergolong sedang, atribut tersebut tidak masuk prioritas utama karena tingkat kepentingannya relatif lebih rendah dibanding atribut pada Kuadran I.

Kondisi ini penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan salah tafsir bahwa semua *gap* besar harus langsung diperbaiki. Dalam pendekatan IPA, prioritas tidak hanya ditentukan oleh besarnya *gap*, tetapi oleh kombinasi antara tingkat kepentingan dan kinerja. Artinya, atribut pada Kuadran III bisa saja memiliki *gap* yang cukup

besar, tetapi tetap tidak menjadi fokus utama karena tidak dianggap sebagai faktor kunci oleh stakeholder.

Ekspektasi stakeholder pada atribut di Kuadran III umumnya bersifat pelengkap atau pendukung, bukan inti dari proses utama. Stakeholder tidak menempatkan atribut ini sebagai penentu keberhasilan, melainkan sebagai aspek yang baik jika ada, namun tidak kritis jika belum optimal. Oleh karena itu, meskipun kinerja belum maksimal, kondisi ini tidak menimbulkan tekanan tinggi untuk segera dilakukan perbaikan.

Atribut pada Kuadran III biasanya berkaitan dengan aspek administratif tambahan, respons non-kritis, atau efisiensi proses yang tidak secara langsung mempengaruhi keberhasilan pelelangan. Dampak dari *gap* pada atribut ini cenderung bersifat tidak langsung, seperti memperlambat proses secara minor, namun tidak sampai menyebabkan kegagalan lelang atau *backlog* aset secara signifikan.

Secara empiris, penelitian ini sejalan dengan penelitian Hermanto, (2022) dan Utomo Galih Sukmo & Hartatik, (2024) yang menunjukkan bahwa atribut pada Kuadran III memiliki pengaruh terbatas terhadap kepuasan dan kinerja utama, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam strategi peningkatan kinerja. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua kelemahan dalam sistem harus ditangani secara bersamaan, melainkan perlu dilakukan prioritas yang rasional.

Dari perspektif teori manajemen aset publik, atribut pada kuadran ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari fungsi pendukung dalam siklus pengelolaan aset. Artinya, keberadaannya tetap penting untuk menjaga kelengkapan sistem, tetapi tidak menjadi faktor penentu utama dalam efektivitas pengelolaan aset.

Dalam konteks good governance, meskipun atribut pada Kuadran III bukan prioritas utama, prinsip akuntabilitas dan pengendalian tetap harus diterapkan. Artinya, atribut tersebut tetap perlu dipantau agar tidak mengalami penurunan kinerja yang lebih jauh. Sementara itu, dari sisi regulasi, atribut-atribut ini tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak memerlukan alokasi

sumber daya yang besar atau intervensi yang bersifat mendesak.

Strategi yang tepat untuk Kuadran III adalah menjaga kinerja pada tingkat minimum yang memadai, sambil mengalokasikan sumber daya secara lebih optimal pada atribut di Kuadran I yang memiliki dampak lebih signifikan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan secara lebih terarah dan proporsional.

4. Kuadran IV (Berlebihan)

Kuadran IV menunjukkan kondisi di mana tingkat kinerja tinggi, namun tingkat kepentingannya relatif rendah menurut stakeholder. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pada atribut-atribut tersebut telah melampaui ekspektasi, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya. Kondisi ini mencerminkan bahwa BKAD telah memberikan perhatian yang cukup besar pada aspek tertentu yang sebenarnya bukan menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelelangan dan penghapusan aset.

Atribut dalam kuadran ini memiliki *gap* yang sangat kecil, seperti A8 dan E2 dengan *gap* 0,00 (kesesuaian 100%), C5 dengan *gap* 0,04 (kesesuaian 99,14%), serta D5 dengan *gap* 0,07 (kesesuaian 98,51%). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja sudah sangat optimal dan hampir sepenuhnya memenuhi harapan stakeholder. Namun, atribut-atribut ini memiliki tingkat kepentingan yang relatif sedikit di bawah rata-rata (4,74), sehingga tidak dikategorikan sebagai faktor prioritas utama. Artinya, stakeholder memang mengharapkan atribut tersebut berjalan baik, tetapi tidak menjadikannya sebagai penentu utama keberhasilan pengelolaan aset.

Jika dilihat dari substansinya, atribut pada Kuadran IV umumnya berkaitan dengan aspek administratif rutin dan pasca-proses, seperti kelengkapan dokumen dasar (A1, A2), efisiensi verifikasi (A7), akurasi dokumen formal (A8), efektivitas publikasi (C5), konsistensi prosedur (D5), serta pemutakhiran data dan dampak administratif (E2, E5, E6). Atribut-atribut ini bersifat mendukung sistem, namun tidak secara langsung menjadi

penyebab utama permasalahan seperti keterlambatan pelelangan atau tidak terjualnya aset.

Kondisi ini sejalan dengan penelitian Krisindarto, (2012) yang menemukan bahwa dalam analisis IPA sering terdapat atribut dengan kinerja tinggi namun tingkat kepentingannya rendah, sehingga menunjukkan adanya ketidaksesuaian persepsi antara pengelola dan pengguna layanan. Selain itu, Utami *et al.*, (2022) juga menegaskan bahwa atribut pada Kuadran IV mencerminkan adanya penggunaan sumber daya yang berlebihan pada aspek yang tidak terlalu prioritas, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan realokasi sumber daya.

Penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa Kuadran IV bukan menunjukkan kelemahan kinerja, melainkan menunjukkan ketidaktepatan fokus pengelolaan. Artinya, organisasi telah bekerja dengan baik, tetapi belum sepenuhnya bekerja pada hal yang paling berdampak.

Dari perspektif teori *value for money*, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya aspek efisiensi, karena sumber daya digunakan secara berlebihan pada atribut yang kontribusinya tidak signifikan terhadap output utama. Dalam kerangka *good governance*, hal ini menunjukkan perlunya penajaman dalam penentuan prioritas agar pengelolaan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ekspektasi stakeholder pada atribut di Kuadran IV cenderung bersifat standar, yaitu cukup berjalan dengan baik, akurat, dan sesuai prosedur. Oleh karena itu, ketika kinerja sudah sangat tinggi, peningkatan tambahan tidak memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas pengelolaan aset, khususnya dalam menyelesaikan masalah utama seperti terhambatnya pelelangan kendaraan dinas.

Strategi yang disarankan adalah mempertahankan kinerja pada tingkat yang wajar, tanpa meningkatkan secara berlebihan, serta mengalihkan sebagian sumber daya ke atribut pada Kuadran I yang memiliki tingkat kepentingan tinggi namun kinerjanya masih rendah. Sehingga, pengelolaan aset daerah dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan selaras dengan

prinsip pengelolaan keuangan daerah yang optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil Tingkat kepentingan (*importance*) dan tingkat kinerja (*performance*) dalam pelaksanaan pelelangan dan penghapusan aset kendaraan dinas di BKAD Kota Kupang menunjukkan bahwa seluruh atribut yang diteliti memiliki peran dalam mendukung efektivitas pengelolaan aset daerah. Nilai rata-rata tingkat kepentingan sebesar 4,74 berada pada kategori sangat penting, yang mengindikasikan bahwa stakeholder internal memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap seluruh aspek dalam proses pengelolaan aset, baik dari sisi administrasi, fisik, penilaian, koordinasi, maupun akuntabilitas. Sementara itu, nilai rata-rata tingkat kinerja sebesar 4,52 menunjukkan bahwa pelaksanaan secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun demikian, perbandingan antara tingkat kepentingan dan kinerja menghasilkan nilai kesenjangan (*gap*) yang masih positif pada sebagian besar atribut, yang berarti kinerja belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan stakeholder. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan cukup optimal, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan peningkatan, khususnya pada atribut yang memiliki peran lebih besar terhadap keberhasilan proses pelelangan dan penghapusan aset. Dengan demikian, hasil analisis ini menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya berfokus pada tingkat kinerja yang sudah baik, tetapi juga pada sejauh mana kinerja tersebut mampu memenuhi tingkat kepentingan yang diharapkan.

Hasil pemetaan menggunakan *Importance-Performance Analysis* (IPA) melalui Diagram Kartesius menunjukkan bahwa atribut penelitian tersebar ke dalam empat kuadran yang mencerminkan tingkat prioritas penanganan yang berbeda. Pada Kuadran I (prioritas utama) terdapat atribut A6 (kelengkapan berkas usulan dari OPD) dengan *gap* sebesar 0,50 dan C3

(kesesuaian harga limit lelang) dengan *gap* sebesar 0,40, yang menunjukkan adanya kesenjangan paling signifikan antara harapan dan kinerja. Kedua atribut ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penghapusan aset, di mana permasalahan yang terjadi meliputi ketidaklengkapan dan keterlambatan dokumen usulan dari OPD, serta penetapan harga limit lelang yang belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pasar. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya proses verifikasi, rendahnya minat peserta lelang, serta meningkatnya potensi aset tidak terjual atau tertunda. Sementara itu, atribut pada Kuadran II menunjukkan kondisi ideal karena memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang sama-sama tinggi, sehingga perlu dipertahankan konsistensinya sebagai kekuatan utama dalam sistem pengelolaan aset. Kuadran III mencerminkan atribut dengan tingkat kepentingan dan kinerja yang relatif rendah, sehingga tidak menjadi prioritas utama dalam perbaikan, meskipun tetap perlu diawasi agar tidak mengalami penurunan. Adapun Kuadran IV menunjukkan atribut dengan kinerja tinggi namun tingkat kepentingannya relatif lebih rendah yang mengindikasikan adanya potensi ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prioritas utama perbaikan terletak pada penguatan aspek administrasi usulan penghapusan oleh OPD serta optimalisasi mekanisme penentuan harga limit lelang agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar, sehingga proses pelelangan dan penghapusan aset dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mengurangi backlog aset kendaraan dinas.

Saran

Perlu dilakukan peningkatan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyusunan dan pengajuan berkas usulan penghapusan aset kendaraan dinas agar lebih lengkap, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. OPD juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam melengkapi dokumen administrasi kendaraan dinas sebagai syarat utama

dalam proses penghapusan. OPD juga perlu lebih proaktif dalam mengusulkan penghapusan aset yang sudah tidak layak pakai agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dinas yang tidak produktif.

Selain itu, BKAD perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme penentuan harga limit lelang agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar, sehingga dapat meningkatkan minat peserta lelang dan mempercepat proses penghapusan aset. Pengawasan terhadap kondisi kendaraan sebelum proses pelelangan juga perlu ditingkatkan untuk menjaga nilai ekonomis aset.

DAFTAR PUSTAKA

- Andhika, L. R. (2017). Evolusi konsep tata kelola pemerintah: Sound governance, dynamic governance dan open government. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 87–102.
- Asyraini, S. (2023). Penerapan Metode Importance Performance Analysis Terhadap Kepuasan Konsumen pada Pelayanan Jasa Asrama Universitas AmirHamzah. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2), 480–492. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2777>
- Firmansyah, A. (2024). Transformasi Pengelolaan Aset Daerah: Penguatan Pengendalian Internal dan Integrasi Teknologi untuk Optimalisasi BMD. *ResearchGate*.
- Giglio, J. M., Friar, J. H., & Crittenden, W. F. (2018). Integrating lifecycle asset management in the public sector. *Business Horizons*, 61(4), 511–519.
- Hanis, M. H. (2012). A public asset management framework for Indonesian local governments. *Queensland University of Technology*.
- Hermanto, H. (2022). Meningkatkan Kepuasan Serta Kepercayaan Pelanggan Dan Mengurangi Tingginya Komplain Menggunakan Metode Importance Performance Analysis (IPA). *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 1(9), 757–763. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.740>
- Krisindarto, A. (2012). Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 403. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6497>
- Machmud, Y. S., Irwan, A. L., & Irwan, A. I. U. (2023). The implementation of good governance principles in the asset management of regional-owned enterprises of South Sulawesi Province. *KnE Social Sciences*, 840–856.
- Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. *Journal of marketing*, 41(1), 77–79.
- Molidya, A., A. Tungga, C., & T. Ch. Bolang, R. (2022). Regional Asset Management Analysis In Kupang District. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(12), 2654–2667. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i12.690>
- Mulyana, Y. (2023). Evaluation of Local Government Property Administration Policies. *Evaluation Of Local Government Property Administration Policies*, 5(2), 73–81.
- Peraturan Daerah Kota Kupang No 2 Tahun. (2023). Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun. (2024). Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. *Permendagri*, 1–23. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/300030/permendagri-no-7-tahun-2024>
- Soleh, C., & Rochmansjah, H. (2010). Pengelolaan keuangan dan aset daerah: sebuah pendekatan struktural menuju tata kelola pemerintahan yang baik. *Fokusmedia*.
- Tungga, C. A. (2020). Analisis Inventarisasi Aset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019. *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12(2), 135–148. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.26>

85

- Utami, S. P., Maarif, M. S., & Simanjuntak, M. (2022). Strategy for Increasing Consumer Satisfaction of Hospital Services Using Importance-Performance Analysis (IPA) Approach. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 8(2), 383–393. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.2.383>
- Utomo Galih Sukmo, & Hartatik, N. (2024). Penerapan Metode Ipa (Importace Performance Analysis) Untuk Mengukur Tingkat Kepuasan Penumpang Pada Kinerja Terminal Intermoda Joyoboyo Surabaya Jawa Timur. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 343–351. <https://idm.or.id/JSCR/inde>
- Vidyanto, V., Bertus, B. N., Krisnasari, S., & Napirah, M. R. (2023). Analysis of Satisfaction Levels of Patients on Service Quality with The Importance Performance Analysis (IPA) Method. *Journal of Health and Nutrition Research*, 2(3), 109–119. <https://doi.org/10.56303/jhnresearch.v2i3.207>
- Yulianti, E., & Umbara, T. (2020). Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Kualitas Pelayanan Dengan Metode Importance Performance Analysis. *Jurnal Teknoif Teknik Informatika Institut Teknologi Padang*, 8(2), 78–86. <https://doi.org/10.21063/jtif.2020.v8.2.78-86>